



**Kementerian Perhubungan
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan**

**Laporan
Monotoring
Capaian
Kinerja**

**Triwulan 1
2023**



HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Susiani, A.Md LLAJ, S.T., M.T.	Analisis Data dan Informasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan, Seksi Rancang Bangun Terminal	13/4/23	
2.	Diperiksa	Dody Arifianto, S.T., MMTr.	Ketua Tim Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	13/4/23	
3.	Diperiksa	Jekky Hendri, S.Sos	Ketua Tim Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	13/4/23	
4.	Disetujui	Ahmadi Z.B., ATD, S.E., M.M.	Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan	13/4/23	



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Agus Jaya, S.ST.	Penyusun Bahan Usaha, Seksi Penyelenggaraan Kemitraan	13/23 /4	
2.	Diperiksa	Diana Septi Rahayu, S.E., M.T.	Ketua Tim Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	13/23 /4	
3.	Diperiksa	Rizki Fauzi Rahman, S.SiT, M.Si.	Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	13/23 /4	
4.	Disetujui	Susanty Pertiwi, S.S., M.HUM.	Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana	13/23 /4	



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Rumsiah Nopitasari, S.SiT.	Penyusun Bahan Kebijakan, Seksi Pengelolaan PKB	13/4 ²³	
2.	Diperiksa	Teguh Ilman Santoso, A.Md LLAJ., S.T., M.Sc.	Ketua Tim Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	13/4 ²³	
3.	Diperiksa	Ayu Nilawati Agustina, SE., M.MTr.	Ketua Tim Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	13/4 ²³	
4.	Disetujui	Eriza Putra, S.Si, M.M.	Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	13/4 ²³	



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Dwiki Adhitya, S.ST.	Penyusun Rencana dan Program, Seksi Integrasi Moda	13/4 ²³	
2.	Diperiksa	Astri Widiani, A.Md LLAJ, S.E.	Ketua Tim Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	13/4 ²³	
3.	Disetujui	Herman Armanda, S.E., M.T.	Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	13/4 ²³	



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Riska Mahanani Pratiwi, A.Md LLAJ, S.T.	Penyusun Data Kepegawaian	13/4 ²³	
2.	Diperiksa	Sudarmaji, S.A.P.,M.M.	Ketua Tim Kelompok Substansi Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	13/4 ²³	
3.	Disetujui	Ir. M. Popik Montanasyah, M.T.	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	13/4 ²³	



**KATA
PENGANTAR**



KATA PENGANTAR



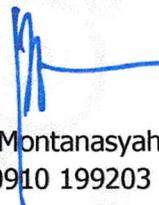
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Triwulan I Tahun 2023.

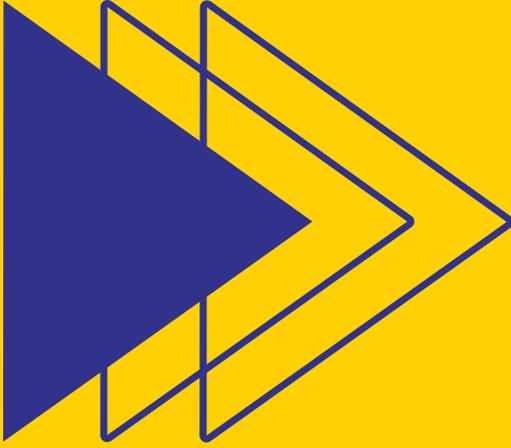
Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 13 April 2023

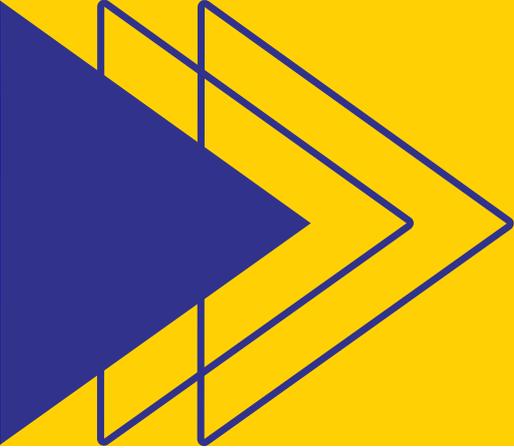
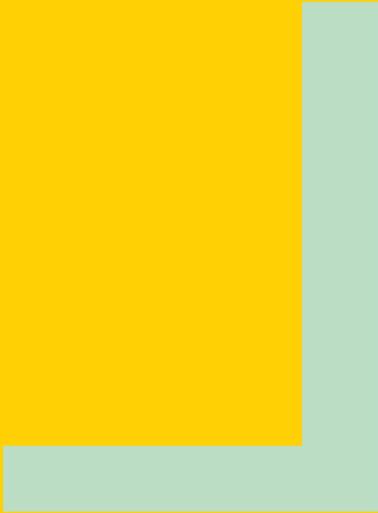
Direktur Prasarana Transportasi Jalan



Ir. M. Popik Montanasyah, M.T.
NIP. 19630910 199203 1 003



RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis tersebut, maka dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2023, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SK \geq 100\%$) dan 2 (dua) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq SK < 100\%$).

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2023, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari 9 (sembilan) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 7 (tujuh) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 2 (dua) status merah dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$):

1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi **0,62** (target tahun 2023 sebesar 0,62), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar **105** lokasi (target tahun 2023 sebesar 105 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
3. Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar **12** lokasi (target tahun 2022 sebesar 11 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **109,09%**;
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **94,93%** (target tahun 2023 sebesar 81,00) dengan Capaian Kinerja sebesar **115,60%**;
5. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **59,02%** (target tahun 2023 sebesar 53,7%), dengan capaian kinerja sebesar **109,91%**;
6. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi **83,41%** (target tahun 2023 sebesar 78,6%), dengan capaian kinerja sebesar **106,12%**;
7. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi **74,58** (target tahun 2023 sebesar 73), dengan capaian kinerja sebesar 102,16%;

Indikator Kinerja Kegiatan dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$) :

- 1) Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar **31,69%** (target tahun 2023 sebesar 25%), dengan capaian kinerja sebesar **73,24%**.
- 2) Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar **83** (target tahun 2023 sebesar 88), dengan capaian kinerja sebesar 94,32%;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran Kinerja adalah sebesar **96,05%** dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebesar **100,15%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala.



BAB I

PENDAHULUAN



I.1 Latar Belakang

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, *Transparan*, *Akuntabel*, *Efektif* dan *Efisien* sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

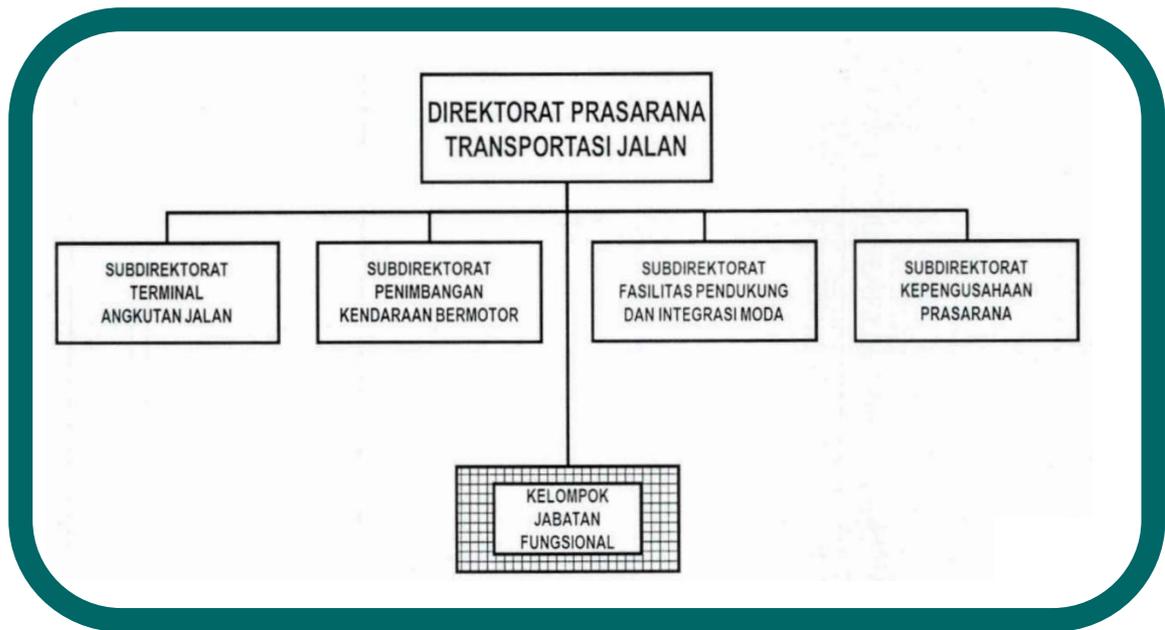
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

1. Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana;

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan



I.3 Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan posisi Tahun 2023 diklasifikasikan menurut sub unit kerja sebanyak 83 orang pegawai, Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

NO.	SUB UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPNPN	JUMLAH
1.	Kelompok Tata Usaha	8	-	7	15
2.	Sub Direktorat Terminal Angkutan Jalan	11	3	3	17
3.	Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	11	2	7	20
4.	Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	11	1	5	17
5.	Sub Direktorat Kepengusahaan Prasarana	11	-	3	14
Jumlah		51	6	25	83

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - i Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
 - ii Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
 - iii Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - i Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen).
 - ii Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target, sasaran dan tujuan organisasi, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, meliputi ketersediaan

SDM yang ideal sesuai dengan beban kerja yang ada pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Prasarana Transportasi Jalan hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat dengan DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada TA. 2023 sebesar Rp.58.794.522.000,-.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah:

- a) Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
- b) Pengoperasian Terminal Penumpang;
- c) ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
- d) Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB;

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 adalah:

- a) Rencana Strategis;
- b) Perjanjian Kinerja;
- c) Indikator Kinerja Kegiatan;
- d) Pengukuran Kinerja;
- e) Evaluasi Kinerja

I.5 Sistematika Laporan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- I. 1. Latar Belakang
- I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I. 3. Sumber Daya Manusia
- I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I. 5. Sistematika Laporan
- I. 6. Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

GA Program Infrastruktur Konektivitas

II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

II.2.1.1 IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.2 IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.1.3 IKK 3 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2 SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

II.2.2.1 IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.2 IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.3 SK3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat

II.2.3.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.4 SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

II.2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.2.5 SK1 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

II.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - Narasi Dasar Hukum
 - Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
 - Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
 - Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
 - Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
 - Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
 - Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

II.3 Realisasi Anggaran

II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023

II.3.1.1 Pagu Anggaran

- a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023
- a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023
- a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

II.3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2023

- a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023
- a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023
- a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023
- a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2023

II.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2023

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

- II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2023
- II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023
- II.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023
- II.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- II.3.3.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
- II.3.3.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
- II.3.3.3 Hambatan dan Kendala

BAB III PENUTUP

III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
3. Rencana Aksi Tahun 2023 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2023
5. Lain – lain yang dianggap perlu.

1.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan target indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Sasaran Program Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat bersinergi dalam mendukung tercapainya Sasaran Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel I. 2 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024 Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0.58	0.61	0.67	0.67	0.70
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	104	104	111	111	114
			IKK 3	Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	4	9	15	20	25
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	Indeks (%)	79.50	80.00	80.50	81.00	81.50
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Rasio (%)	53.57	53.60	53.65	53.70	53.75

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Rasio (%)	70.35	71.03	74.15	78.60	83.38
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	Rasio (%)	50.0	35.0	30.0	25.0	20.0
WA Program Dukungan Manajemen										
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	85	86	87	88	89
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	70	71	72	73	74

I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan 2023

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan target kinerja tahun 2023 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 terdiri dari Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.3 Rencana Kinerja Tahunan 2023

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2023
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,67
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	111
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	20
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	25
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus

dilaksanakan dalam Tahun 2023 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektifitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 1 Januari 2023 sebesar Rp. 58.794.522.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel I.4 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2023
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp25.227.734.000,00 |
| 2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat | Rp 9.070.700.000,00 |
| 3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp 23.746.088.000,00 |
| 4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat | Rp 27.218.804.000,00 |

BAB II

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dimasa mendatang.

• Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:


$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja digunakan Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan Aplikasi *E-Performance*, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	Q1		
			T	R	C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					100,00%
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62	0,62	100,00%
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	105	100,00%
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12	12	100,00%
SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat					110,54%
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00	81,00	115,60%
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70	53,70	109,91%
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60	78,60	106,12%
SK3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat					73,24%
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	25	25	73,24%
SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					94,32%
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	83	94,32%
SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					102,00%
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	74,58	102,16%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan					96,05%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan				100,13%	
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)				7	
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)				2	

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

Jika dilihat lebih detail, pada Tahun 2023, berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari 9 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 7 (tujuh) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%) dan 2 (dua) status merah dengan kondisi kurang dari 100% (0%≤IKP<100%).

Selama tahun 2023, terdiri 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya terdapat 9 (sembilan) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

II.2.1 SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

- **Uraian Kegiatan**

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi.

Tabel II. 2 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1
SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,62	
		Target		0,62
		Realisasi		0,62
		Capaian		100,00%
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	105	
		Target		105
		Realisasi		105
		Capaian		100,00%
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda	lokasi	12	
		Target		12
		Realisasi		12
		Capaian		100,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.
2. IKK 2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi
3. IKK 3. Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda

II.2.1.1 IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 3 Capaian Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Satuan: Rasio
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2023
Target	0,62	
Realisasi	0,62	
Capaian	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan merupakan perbandingan Jumlah KSN Prioritas yang telah terlayani prasarana transportasi jalan pada Kawasan Prioritas Nasional terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s. d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN}) \text{ yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang ditetapkan}}$$

Keterangan:

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani prasarana transportasi jalan dan meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;
4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

9 Kawasan Industri (KI)

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintan Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;

- 30. Tarakan;
- 31. Gorontalo;
- 32. Manado;
- 33. Bitung;
- 34. Palu;
- 35. Maminasata;
- 36. Kendari;
- 37. Ambon;
- 38. Ternate;
- 39. Sorong;
- 40. Timika;
- 41. Jayapura;
- 42. Merauke.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 0,62 jika dibandingkan dengan target PK tahun 2023 sebesar 0,62 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.1**. Grafik Capaian IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.



Gambar II. 1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

• Narasi Dasar Hukum

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 Kementerian Perhubungan, terdapat sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan untuk dilayani Angkutan Umum dan Fasilitas Prasarana Jalan serta Angkutan dan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penyeberangan. Dari total Kawasan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah melayani 83 Kawasan Strategis Nasional.

a) Terminal Penumpang Tipe-A

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia sebagaimana dalam **Lampiran 1**, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah **126 (seratus dua puluh enam)** terminal dengan rincian eksisting sampai dengan Triwulan I tahun 2023 sebagai berikut:

1. **112 (seratus dua belas)** Terminal Penumpang Tipe A telah **serah terima** operasional yang menjadi kewenangan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - a) 104 Terminal Penumpang Tipe A **telah beroperasi**
 - b) 8 Terminal Penumpang Tipe A **belum beroperasi**, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. 4 (empat) Terminal Penumpang Tipe A masih dalam proses pembangunan dan revitalisasi yaitu:
 - Terminal Demak (Jawa Tengah)
 - Terminal Bimoku (Nusa Tenggara Timur)
 - Terminal Bolaangmongondow (Sulawesi Utara)
 - Terminal Singkawang (Kalimantan Barat)
 - ii. 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih proses kajian alih fungsi terminal karena lokasi terminal tidak strategis sehingga perlu direlokasi ke jaringan JKP atau JAP (Terminal Betan Subing Provinsi Lampung).
 - iii. 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A rusak berat akibat gempa tahun 2000 dan baru akan dimulai proses revitalisasi pada tahun ini (Terminal Air Sebaku, Bengkulu).
 - iv. 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih terkendala mekanisme serah-terima aset dengan Pemerintah Daerah (Terminal Bangkalan, Jawa Timur)
 - v. 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A tidak ada jalan akses (Terminal Liwas Provinsi Sulawesi Utara).
2. **4 (empat)** Terminal Penumpang Tipe A beroperasi yang menjadi kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan telah beroperasi;
3. **2 (dua)** Terminal Penumpang Tipe A beroperasi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
4. **8 (delapan)** Terminal Penumpang Tipe A beroperasi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat.

Dari 126 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia terdapat **54 (lima puluh empat)** Terminal Penumpang Tipe

A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak **41 (empat puluh satu) Kawasan (Lampiran 9)** dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari **10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 9 (sembilan) Kawasan Industri (KI), 8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** dan **42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**. Sisanya 73 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.

b) Terminal Barang Untuk Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

1. KP 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 2**);
2. KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 3**);
3. KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 4**) dan;
4. KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua (**Lampiran 5**).

Berikut adalah jumlah Terminal Barang untuk umum sebanyak 7 Terminal, antara lain:

1. Entikong di Kalimantan Barat;
2. Skouw di Papua. (PKN Jayapura)
3. Aruk di Kalimantan Barat;
4. Nanga Badau di Kalimantan Barat;
5. Motaain di Nusa Tenggara Timur;
6. Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
7. Wini di Nusa Tenggara Timur;

Rincian dari 7 (tujuh) Terminal Barang Untuk Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) Terminal Barang Untuk Umum yaitu Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong yang sudah selesai dibangun pada tahun 2020, dengan kondisi tahun 2022 sudah ada operasional internal oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) akan tetapi belum ada pelayanan terhadap kendaraan barang baik kendaraan barang domestik maupun kendaraan barang internasional. Adapun kendala/masalah yang masih dihadapi Terminal Barang Entikong adalah sebagai berikut:
 - a) Sesuai PMK Nomor 109/PMK.04/2020, agar bisa ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS), harus ada badan usaha pengelola TPS. Sudah ada beberapa pengusaha yang berminat untuk menjadi pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dan proses lelang sudah dilakukan namun terkendala sertifikat lahan yang belum selesai diproses.
 - b) Proses Sertifikat tanah masih terdapat kendala dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong sehingga proses Penetapan Status Penggunaan (PSP) tanah menjadi terhambat. Pihak yang berbatasan

tanah tersebut tidak mau menandatangani surat ukur tanah yang menjadi syarat untuk penerbitan sertifikat tanah Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong.

- c) Sudah dilakukan proses pemilihan penyewa Barang Milik Negara (BMN) di Terminal Barang Internasional Entikong dan sedang menunggu penetapan mitra sewa oleh Kementerian Perhubungan. Terkait permasalahan lahan yang belum selesai, proses pemilihan penyewa BMN tersebut sedang digugat ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
 - d) Pasca pandemi Covid-19, perbatasan Indonesia-Malaysia telah dibuka sejak 1 April 2022, namun Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditas antar 2 negara belum ditetapkan dikarenakan Forum Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) diundur pelaksanaannya sampai waktu yang belum ditentukan.
 - e) Jalan akses khusus dari Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menuju Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong belum ada, tetapi sudah ditindak lanjuti oleh Direktorat Pembangunan Jalan Kementerian PUPR. Untuk sementara, direncanakan menggunakan jalan umum.
2. Terdapat 1 (satu) Terminal Barang Untuk Umum yang baru selesai proses pembangunannya pada Tahun Anggaran 2022 dan sudah dialokasikan anggaran operasional untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu Terminal Barang Internasional Skouw di Papua.
 3. Terdapat 5 (lima) Terminal Barang Untuk Umum yang masih dalam proses pembangunan, yaitu Aruk di Kalimantan Barat, Nanga Badau di Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur, Motamasin di Nusa Tenggara Timur, dan Wini di Nusa Tenggara Timur.

c) Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 (**Lampiran 6**);
2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (**Lampiran 7**) dan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (**Lampiran 8**).

Terdapat penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di **Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional** dengan target penyediaan fasilitas pendukung sampai dengan tahun 2022 sebanyak **11 lokasi**.

Penyediaan fasilitas pendukung tersebut sudah terealisasi di **12 lokasi**, antara lain:

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika dan Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika (mendukung penyelenggaraan Moto GP tahun 2022);
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang;
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo;
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta;
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten;
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga;
7. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang;

8. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru;
9. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba;
10. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur;
11. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
12. Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema *Buy The Service* di Denpasar.

Dari target **11 (sebelas)** lokasi penyediaan fasilitas pendukung, terdapat **12 (dua belas)** lokasi sudah terealisasi yang berada di **8 kawasan**. tersaji pada **Lampiran 9**.

- **Narasi Kronologi Target**

Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target pada tahun 2023 adalah sebesar 0,67 dengan target 47 KSN terlayani oleh simpul Prasarana Transportasi Jalan disesuaikan dengan kegiatan pada DIPA TA 2023 menjadi 0,62 dengan target 43 KSN terlayani simpul Prasarana Transportasi Jalan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan setelah disesuaikan dengan realisasi capaian kinerja dimana terdapat 43 kawasan yang terlayani oleh simpul prasarana transportasi jalan sehingga pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, telah dilakukan revisi target menjadi 0,62 karena belum ada penambahan simpul lokasi baru pada Kawasan Strategis Nasional.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan terhadap kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan tahun 2023 yaitu:

1. Dari 126 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia terdapat **54 (lima puluh empat)** Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak **41 (empat puluh satu) Kawasan (Lampiran 9)** dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari **10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)**, **9 (sembilan) Kawasan Industri (KI)**, **8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** dan **42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**. Sisanya 73 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.
2. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I tahun 2023, Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung tahun 2023 sebanyak 12 lokasi, dapat terealisasi sebanyak 12 (dua belas) lokasi, yaitu Mandalika, Magelang, Purworejo, Surakarta, Klaten, Salatiga, Palembang, Pekanbaru, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Denpasar. Penambahan realisasi ada pada akhir tahun 2022, yaitu adanya penambahan pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo. Sehingga dari 12 (dua belas) lokasi penyediaan fasilitas pendukung pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2023, telah terealisasi sebanyak 12 (dua belas) lokasi yang berada di 8 Kawasan Strategis Nasional;
3. Adanya Kegiatan Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan dan Survey dan Monitoring Simpul-Simpul Transportasi di KSPN;

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu:

1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2023 sama dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu sebesar 104 Terminal untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum.
2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal.
3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Barang Umum yaitu:

1. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik;
2. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/*demand* yang cukup besar;
3. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi *Immigration, Customs, Quarantine and Security* (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.

Keberhasilan Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berhasil dicapai pada tahun 2023 yaitu :

1. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan *event* MotoGP dengan melakukan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Mandalika melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali dengan melakukan Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema *Buy The Service* di Denpasar melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Penentuan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional;
4. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas.

● **Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan**

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Penumpang Tipe A** antara lain:

1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A.
2. Terdapat *backlog* kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan.

3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan.

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Barang Umum** antara lain (3 point):

1. Terdapat kendala operasional kendaraan barang belum masuk ke terminal dikarenakan kesepakatan dengan negara lain masih dalam proses administrasi, pembangunan jalan khusus belum selesai dibangun dan penetapan pengelola yang terkendala masalah lahan.
2. Terdapat *backlog* kegiatan pembangunan Terminal Barang Untuk Umum lanjutan karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat dilaksanakan pada semua terminal yang belum selesai dibangun.
3. Operasional kendaraan barang masuk ke Terminal Barang Untuk Umum tergantung pada kesepakatan antara 2 negara terkait Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditi.

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda** antara lain:

1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan;
2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung;
3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda

- **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan merupakan perbandingan Jumlah KSN Prioritas yang telah terlayani prasarana transportasi jalan pada Kawasan Prioritas Nasional terhadap jumlah Kawasan Strategis Nasional yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

Sehingga:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun}(n)(10 \text{ DPP}, 9 \text{ KI}, 8 \text{ KEK}, 42 \text{ PKN})}{\text{yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}} \\ & = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang ditetapkan}} \\ \text{Capaian Rasio Konektivitas} & = \frac{43 \text{ wilayah (irisan simpul TTA \& faspim yang terlayani)}}{69 \text{ wilayah KSN}} = 0,62 \end{aligned}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target PK Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,62}{0,62} \times 100\% = 100,00\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				
IKK 1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	865.307.000	865.307.000	274.901.790	31,77%
1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan;	357.420.000	357.420.000	246.525.910	68,97%
2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan;	507.887.000	507.887.000	28.375.880	5,59%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan pengawasan kegiatan pembangunan pada simpul-simpul prasarana transportasi Jalan;
2. Mengusulkan kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan target pada sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.1.2 IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 5 Capaian Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Satuan: Lokasi
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2023
Target	105	
Realisasi	105	
Capaian	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi merupakan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah TTA \& TB yang beroperasi} \\ & = \text{Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang Beroperasi} + \text{Jumlah Terminal Barang Umum yang beroperasi} \end{aligned}$$

Keterangan :

* TTA = Terminal Tipe A

TB = Terminal Barang

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 105 lokasi jika dibandingkan dengan target PK tahun 2023 sebesar 105 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.2**. Grafik Capaian IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi.



Gambar II. 2 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Terminal Penumpang Tipe-A

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia sebagaimana dalam **Lampiran 1**, jumlah Terminal Penumpang Tipe A adalah **126 (seratus dua puluh enam)** terminal dengan rincian eksisting sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

1. 112 (seratus dua belas) Terminal Penumpang Tipe A telah **serah terima** operasional yang menjadi kewenangan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

a. 104 Terminal Penumpang Tipe A **telah beroperasi**

b. 8 Terminal Penumpang Tipe A **belum beroperasi**, dengan rincian sebagai berikut:

1) 4 (empat) Terminal Penumpang Tipe A masih dalam proses pembangunan dan revitalisasi yaitu:

- Terminal Demak (Jawa Tengah)
- Terminal Bimoku (Nusa Tenggara Timur)
- Terminal Bolaangmongondow (Sulawesi Utara)
- Terminal Singkawang (Kalimantan Barat)

- 2) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih proses kajian alih fungsi terminal karena lokasi terminal tidak strategis sehingga perlu direlokasi ke jaringan JKP atau JAP (Terminal Betan Subing Provinsi Lampung).
 - 3) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A rusak berat akibat gempa tahun 2000 dan baru akan dimulai proses revitalisasi pada tahun ini (Terminal Air Sebakul, Bengkulu).
 - 4) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A masih terkendala mekanisme serah-terima aset dengan Pemerintah Daerah (Terminal Bangkalan, Jawa Timur)
 - 5) 1 (satu) Terminal Penumpang Tipe A tidak ada jalan akses (Terminal Liwas Provinsi Sulawesi Utara).
- c. **4 (empat)** Terminal Penumpang Tipe A beroperasi yang menjadi kewenangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan telah beroperasi;
 - d. **2 (dua)** Terminal Penumpang Tipe A beroperasi yang menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - e. **8 (delapan)** Terminal Penumpang Tipe A beroperasi kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota yang belum diserahkan ke Pemerintah Pusat.

Dari 126 Terminal Penumpang Tipe A yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia terdapat **54 (lima puluh empat)** Terminal Penumpang Tipe A telah melayani Kawasan Strategis Nasional sebanyak **41 (empat puluh satu) Kawasan (Lampiran 9)** dari 69 (enam puluh sembilan) Kawasan Strategis Nasional yg terdiri dari **10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)**, **9 (sembilan) Kawasan Industri (KI)**, **8 (delapan) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)** dan **42 (empat puluh) Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**. Sisanya 73 terminal tidak masuk dalam perhitungan rasio konektivitas transportasi darat karena tidak termasuk dalam kawasan strategis nasional.

Terminal Barang Untuk Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor:

1. KP 75 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum dan Terminal Transit Penumpang di Entikong Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 2**);
2. KM 44 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Nanga Badau yang Berlokasi di Desa Janting, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 3**);
3. KM 45 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum Aruk yang Berlokasi di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat (**Lampiran 4**) dan;
4. KM 139 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Terminal Barang Untuk Umum yang Berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua (**Lampiran 5**).

Berikut adalah jumlah Terminal Barang untuk umum sebanyak 7 Terminal, antara lain:

1. Entikong di Kalimantan Barat;
2. Skouw di Papua. (PKN Jayapura)
3. Aruk di Kalimantan Barat;

4. Nanga Badau di Kalimantan Barat;
5. Motaain di Nusa Tenggara Timur;
6. Motamasin di Nusa Tenggara Timur;
7. Wini di Nusa Tenggara Timur;

Rincian dari 7 (tujuh) Terminal Barang Untuk Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) Terminal Barang Untuk Umum yaitu Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong yang sudah selesai dibangun pada tahun 2020, dengan kondisi tahun 2022 sudah ada operasional internal oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) akan tetapi belum ada pelayanan terhadap kendaraan barang baik kendaraan barang domestik maupun kendaraan barang internasional. Adapun kendala/masalah yang masih dihadapi Terminal Barang Entikong adalah sebagai berikut:
 - a) Sesuai PMK Nomor 109/PMK.04/2020, agar bisa ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS), harus ada badan usaha pengelola TPS. Sudah ada beberapa pengusaha yang berminat untuk menjadi pengelola Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dan proses lelang sudah dilakukan namun terkendala sertifikat lahan yang belum selesai diproses.
 - b) Proses Sertifikat tanah masih terdapat kendala dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong sehingga proses Penetapan Status Penggunaan (PSP) tanah menjadi terhambat. Pihak yang berbatasan tanah tersebut tidak mau menandatangani surat ukur tanah yang menjadi syarat untuk penerbitan sertifikat tanah Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong.
 - c) Sudah dilakukan proses pemilihan penyewa Barang Milik Negara (BMN) di Terminal Barang Internasional Entikong dan sedang menunggu penetapan mitra sewa oleh Kementerian Perhubungan. Terkait permasalahan lahan yang belum selesai, proses pemilihan penyewa BMN tersebut sedang digugat ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
 - d) Pasca pandemi Covid-19, perbatasan Indonesia-Malaysia telah dibuka sejak 1 April 2022, namun Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditas antar 2 negara belum ditetapkan dikarenakan Forum Sosial-Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) diundur pelaksanaannya sampai waktu yang belum ditentukan.
 - f) Jalan akses khusus dari Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong menuju Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong belum ada, tetapi sudah ditindak lanjuti oleh Direktorat Pembangunan Jalan Kementerian PUPR. Untuk sementara, direncanakan menggunakan jalan umum.
2. Terdapat 1 (satu) Terminal Barang Untuk Umum yang baru selesai proses pembangunannya pada Tahun Anggaran 2022 dan sudah dialokasikan anggaran operasional untuk Tahun Anggaran 2023 yaitu Terminal Barang Internasional Skouw di Papua.
3. Terdapat 5 (lima) Terminal Barang Untuk Umum yang masih dalam proses pembangunan, yaitu Aruk di Kalimantan Barat, Nanga Badau di Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur, Motamasin di Nusa Tenggara Timur, dan Wini di Nusa Tenggara Timur.

- **Narasi Kronologi Target**

Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada tahun 2023 yang semula sebanyak 111 lokasi, berubah menjadi 105 lokasi karena pada tahun 2023 belum ada penambahan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang baru yang beroperasi.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan terhadap kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang tahun 2023 yaitu:

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu:

1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2023 sama dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu sebesar 104 lokasi untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 lokasi untuk Terminal Barang Umum.
2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal.
3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A.

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Barang Umum yaitu:

1. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik;
2. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/*demand* yang cukup besar;
3. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi *Immigration, Customs, Quarantine and Security* (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS.

- **Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan**

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Penumpang Tipe A** antara lain:

1. Jumlah SDM yang mengoperasikan terminal antara terminal yang satu dengan terminal yang lainnya belum sesuai porsi kebutuhannya, sehingga menyebabkan belum meratanya jumlah SDM di Terminal Tipe A.
2. Terdapat *backlog* kegiatan sehingga penambahan jumlah terminal baru yang beroperasi tidak signifikan.
3. Keterbatasan anggaran operasional di beberapa terminal penumpang Tipe A yang menyebabkan belum idealnya pagu alokasi dengan ketersediaan jumlah SDM di lapangan.

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Terminal Barang Umum** antara lain (3 point):

1. Terdapat kendala operasional kendaraan barang belum masuk ke terminal dikarenakan kesepakatan dengan negara lain masih dalam proses administrasi, pembangunan jalan khusus belum selesai dibangun dan penetapan pengelola yang terkendala masalah lahan.
2. Terdapat *backlog* kegiatan pembangunan Terminal Barang Untuk Umum lanjutan karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat dilaksanakan pada semua terminal yang belum selesai dibangun.
3. Operasional kendaraan barang masuk ke Terminal Barang Untuk Umum tergantung pada kesepakatan antara 2 negara terkait Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditi.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi merupakan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Untuk menghitung IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Sehingga: } & \text{Jumlah Terminal Penumpang Tipe A} + \text{Jumlah Terminal Barang Umum yang} \\ & \text{beroperasi (sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat)} \\ & = 104 + 1 \\ & = 105 \text{ lokasi} \end{aligned}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang Tahun 2023 terhadap target PK Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{105}{105} \times 100\% = 100,00\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang adalah sebagai berikut:

Tabel II. 6 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 1. Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				
IKK 2. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	500.000.000	500.000.000	37.700.255	7,54%
'Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan	500.000.000	500.000.000	37.700.255	7,54%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan pengawasan kegiatan pembangunan pada simpul-simpul prasarana transportasi Jalan;
2. Mengusulkan kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan target pada sasaran strategis yang telah ditetapkan;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 7 Capaian Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	
IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Satuan: Lokasi
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2023
Target	12	
Realisasi	12	
Capaian	100,00%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

Kawasan Strategis Nasional (KSN) prioritas yang direncanakan untuk diakomodir akan dilayani meliputi 10 DPP, 9 KI, 8 KEK dan 42 PKN dengan total 69 wilayah KSN. Adapun daftar Kawasan prioritas dimaksud adalah sebagai berikut terdiri dari:

10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)

1. KSPN Danau Toba;
2. KSPN Bangka Belitung;
3. KSPN Borobudur;
4. KSPN Bromo Tengger Semeru;
5. KSPN Mandalika;
6. KSPN Labuan Bajo;
7. KSPN Likupang;
8. KSPN Wakatobi;
9. KSPN Morotai;
10. KSPN Raja Ampat.

9 Kawasan Industri (KI)

1. KI Sei Mangkei;
2. KI Galang Batang;
3. KI Bintan Aerospace;
4. KI Sadai;
5. KI Ketapang
6. KI Surya Borneo;
7. KI Palu;
8. KI Teluk Weda;
9. KI Teluk Bintuni

8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. KPBPB Sabang;
2. KEK Arun Lhokseumawe;
3. KPBPB Batam Bintan Karimun;
4. KEK Tanjung Lesung;
5. KEK Mandalika*;
6. KEK MBTK;
7. KEK Bitung;
8. KEK Morotai;

42 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berdasarkan PP 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional:

1. Banda Aceh;
2. Mebidangro;
3. Padang-Lubuk Agung-Pariaman;
4. Pekanbaru;
5. Dumai;
6. Batam;
7. Jambi;
8. Palembang dsk;
9. Bengkulu;
10. Pangkal Pinang;
11. Bandar Lampung;
12. Jabodetabek;
13. Serang;
14. Cilegon;
15. Bandung Raya;
16. Cirebon;
17. Surakarta;
18. Kedungsepur;
19. Cilacap;
20. Yogyakarta;
21. Gerbangkertosusilo;
22. Malang;
23. Sarbagita;
24. Mataram Raya;
25. Kupang;
26. Pontianak;
27. Palangkaraya;
28. Banjarmasin dsk;
29. Balikpapan-Samarinda-Bontang;
30. Tarakan;
31. Gorontalo;
32. Manado;
33. Bitung;
34. Palu;
35. Maminasata;
36. Kendari;
37. Ambon;
38. Ternate;
39. Sorong;
40. Timika;
41. Jayapura;
42. Merauke.

Untuk menghitung IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda} \\ = \text{Fasilitas Pendukung dan Integrasi moda yang sudah terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th ke n}$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada tahun 2023 sebesar 12 lokasi jika dibandingkan dengan target PK tahun 2023 sebesar 12 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.3**. Grafik Capaian IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda.



Gambar II. 3 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024 (**Lampiran 6**);
2. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (**Lampiran 7**) dan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 (**Lampiran 8**).

- **Narasi Kronologi Target**

Berdasarkan target pada renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020-2024, untuk target persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada tahun 2023 yang

semula sebanyak 20 lokasi, berubah menjadi 12 lokasi karena sesuai dengan DIPA TA 2023, belum ada penambahan terkait penyediaan fasilitas pendukung & integrasi moda.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung sampai dengan tahun 2023 ada sebanyak 12 lokasi.

Penyediaan fasilitas pendukung sudah terealisasi di 12 (dua belas) lokasi, antara lain:

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika dan Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Mandalika (mendukung penyelenggaraan Moto GP tahun 2022);
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang;
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo;
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta;
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten;
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga;
7. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang;
8. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru;
9. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba;
10. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur;
11. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Labuan Bajo;
12. Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema Buy The Service di Denpasar.

Berdasarkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdapat 12 (dua belas) lokasi penyediaan fasilitas pendukung, terdapat 12 (dua belas) lokasi sudah terealisasi yang berada di 8 (delapan) kawasan. tersaji pada **Lampiran 9**.

Keberhasilan Ketersediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berhasil dicapai pada tahun 2023 yaitu :

1. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan *event* MotoGP dengan melakukan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda di KSPN Mandalika melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Adanya dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali dengan melakukan Pembangunan Fasilitas Pendukung pada Angkutan Perkotaan skema *Buy The Service* di Denpasar melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Dalam pelaksanaannya sampai dengan Triwulan I tahun 2023, Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung tahun 2023 sebanyak 12 lokasi, dapat terealisasi sebanyak 12 (dua belas) lokasi, yaitu Mandalika, Magelang, Purworejo, Surakarta, Klaten, Salatiga, Palembang, Pekanbaru, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Denpasar. Penambahan realisasi ada pada akhir tahun 2022, yaitu adanya penambahan pembangunan Fasilitas Pendukung di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Labuan Bajo. Sehingga dari 12 (dua belas) lokasi penyediaan fasilitas pendukung pada target Perjanjian Kinerja Tahun 2023, telah terealisasi sebanyak 12 (dua belas) lokasi yang berada di 8 Kawasan Strategis Nasional;

4. Penentuan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional;
5. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda** antara lain:

1. Koordinasi perizinan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) terkait titik lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang berada di atas bahu jalan;
2. Perubahan rute angkutan umum di wilayah KSPN menyebabkan perubahan titik lokasi fasilitas pendukung;
3. Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda merupakan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang telah terbangun di wilayah kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung IKK Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda digunakan rumus sebagai berikut:

Sehingga: *Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda = Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang terbangun pada lokasi KSN Th 2020 s.d Th 2023 = 12 lokasi*

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Triwulan I Tahun 2023 terhadap target PK Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100,00\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 8 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)

GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi				
IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	432.896.000	432.896.000	108.588.895	25,08%
Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu :				
1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;	173.044.000	173.044.000	18.400.000	10,63%
2. Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan;	259.852.000	259.852.000	90.188.895	34,71%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan percepatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada lokasi yang sudah menjadi target pembangunan pada renstra;
2. Meningkatkan kegiatan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda serta Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.2 SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

• Uraian Kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat.

Tabel II. 9 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1
SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00	
		Target		81,00
		Realisasi		93,64
		Capaian		115,60%
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,7	
		Target		53,7
		Realisasi		59,02
		Capaian		109,91%
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,6	
		Target		78,6
		Realisasi		83,41
		Capaian		106,12%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.
2. IKK 2. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A
3. IKK 3. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

II.2.2.1 IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 10 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	
IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2023
Target	81,00	
Realisasi	93,64	
Capaian	115,60%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai capaian kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh publik dimana nilai capaian / Indeks Kepuasan dimaksud diperoleh melalui pelaksanaan Survei yang disebut Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan transportasi darat adalah metode untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik transportasi darat, melalui Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terminal Tipe A menggunakan Proses perumusan Kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Aspek Penilaian

Penilaian publik atas penyelenggaraan transportasi darat melalui aplikasi 3A IPK-IKM atau Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dapat diakses melalui www.skm.dephub.go.id. Unsur penilaian SKM meliputi:

- 1) Persyaratan, Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3) Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- 4) Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

- 5) Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- 6) Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 7) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
- 8) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
- 9) Penanganan Pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- 10) Sarana dan Prasarana, Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2. Pembobotan Nilai

Untuk memperoleh nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan sebagai berikut:

Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 - 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan;
2. memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel II.11 Nilai Resepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Keterangan Tabel : Nilai Persepsi, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

3. Parameter

Pada tahun 2022 Perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan aplikasi 3A IPK-IKM dengan rumus hitung dan unsurnya sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Aplikasi 3A ditujukan untuk melakukan survei cepat penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan menggunakan asumsi penentuan target yang merujuk pada target sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 menggunakan asumsi dari pemenuhan Dokumen Standar Pelayanan;
2. Pada tahun 2022 menggunakan asumsi telah dilaksanakan reuiu dokumen Standar Pelayanan dan Penerapan SPBE;
3. Pada tahun 2023 menggunakan asumsi pelaksanaan implementasi Road Map TIK untuk pelayanan; dan
4. Pada tahun 2024 menggunakan asumsi dari optimalisasi pelayanan pada penerapan SPBE.

Pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Layanan dan dilakukan oleh Para Pengguna Layanan.

4. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari *Krejcie and Morgan* atau dihitung dengan menggunakan rumus:

$$S = \frac{\{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q\}}{\{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

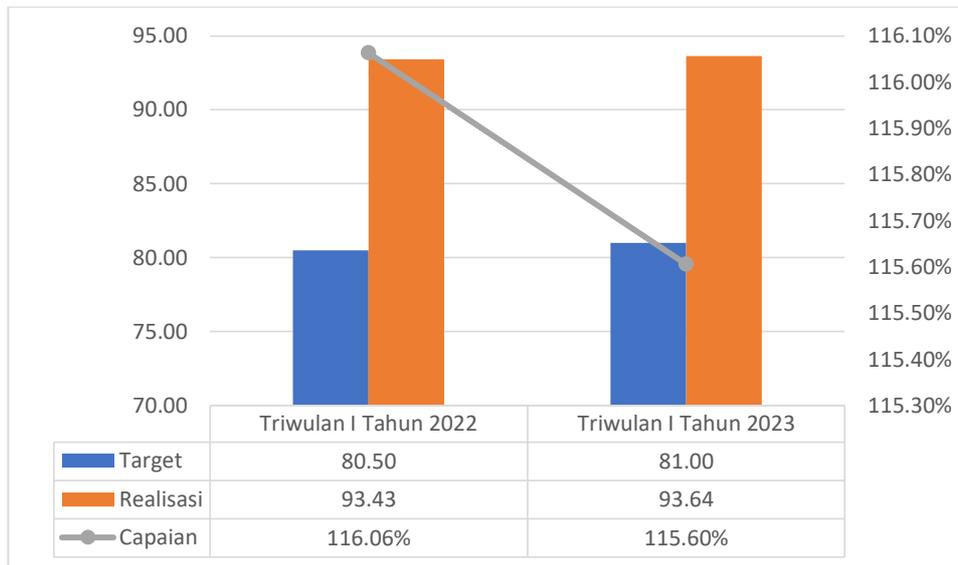
N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 93,64% jika dibandingkan dengan target PK tahun 2023 sebesar 81,00% maka capaian kinerja mencapai 115,60%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.4**. Grafik Capaian IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A.



Gambar II. 4 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area peningkatan pelayanan publik tahun 2022, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan survey pada unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya Satuan Pelayanan Terminal Tipe A dengan menggunakan Aplikasi. Survey tersebut dilaksanakan untuk mengukur Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penggunajasa / stakeholders pada unit layanan Ditjen Perhubungan Darat yang mengacu pada kepada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

- **Narasi Kronologi Target**

Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Terminal Tipe A memiliki target pada tahun 2023 sebesar 81,00 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

Pada tahun 2023 pelaksanaan SKM masih menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi 3A IPK-IKM dan masih berfokus pada pendampingan dan supervisi atas pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dimaksud kepada petugas layanan dan target Survei itu sendiri yaitu seluruh pengguna layanan. sehingga masih banyak kendala yang

dihadapi baik dari sisi pemahaman petugas pelaksana layanan maupun dari sisi pemahaman pengguna jasa yang menyebabkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Terminal Tipe A triwulan I tahun 2023 sudah mencapai 93,64.

Perolehan capaian nilai 93,64 merupakan hasil konversi dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM terhadap range nilai yang terdapat pada Aplikasi 3A IPK-IKM, tabel range dimaksud sebagai berikut:

Capaian Nilai 93,64 diperoleh dari :

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A = 93,64

$$\frac{\text{Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{Nilai Maksimum Persepsi Layanan}} \times 100$$
$$\frac{18,728}{20} \times 100 = 93,64$$

Capaian 93,64 bila disesuaikan pada tabel range akan diperoleh predikat kinerja unit pelayanan pada tingkat Sangat baik.

• **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut:

1. Perbaiki layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana;
2. Mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;
3. Meningkatnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Terminal Tipe A tahun 2023 Triwulan I menjadi 93,64;
4. Tersedianya aplikasi Aplikasi 3A IPK-IKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa Terminal Tipe A.

• **Narasi Faktor Kegagalan**

Adapun beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

Dalam mencapai kinerja pelayanan Terminal Tipe A masih di temukan banyak permasalahan, sampai dengan tahun 2023 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak di temukan pada unit pelayanan publik sebagai berikut:

1. Persyaratan teknis maupun administratif yang dianggap belum memudahkan para pengguna layanan;
2. Prosedur yang dianggap tidak mudah untuk diikuti oleh pengguna layanan;
3. Layanan pengaduan yang masih belum tersedia;
4. Masih terdapat banyak satuan pelaksana yang belum melakukan survey IKM, sehingga hasil rekapitulasi yang diperoleh tidak maksimal.
5. Masih didapati pengguna jasa yang belum seluruhnya mendapatkan kualitas pelayanan yang baik salah satunya yaitu belum mendapatkan informasi secara lengkap terkait prosedur layanan serta petugas pelaksana belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman secara lengkap terkait prosedur layanan serta penerapan pelaksanaan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A triwulan I tahun 2023 yang diisi oleh koresponden pada satuan pelayanan Terminal Tipe A yang beroperasi, melalui aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diperoleh hasil rekapitulasi rata-rata nilai IKM pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 93,64.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, pada tahun 2023, dari 105 Terminal Tipe A yang beroperasi, terdapat 56 Terminal Tipe A yang melakukan survey IKM.

Sehingga:

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A = Rekapitulasi hasil survey IKM pada Terminal Penumpang Tipe A = 93,64 **Lampiran 11**

$$\frac{\text{Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\text{Nilai Maksimum Persepsi Layanan}} \times 100$$
$$\frac{18,686}{20} \times 100 = 93,64$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A pada Triwulan I tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{93,64}{81,00} \times 100\% = 115,60\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A adalah melalui Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A dengan anggaran senilai Rp0,00 dengan realisasi hingga akhir tahun 2023 senilai Rp0,00 dikarenakan untuk IKK Indeks Kepuasan Masyarakat masih belum dianggarkan, karena untuk kegiatannya yaitu melakukan rekapitulasi hasil survey kinerja pelayanan melalui Aplikasi 3A IPK-IKM.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Penumpang Tipe A agar secara rutin melakukan survey IKM dengan melakukan survey koresponden melalui Aplikasi Case Management System IKM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang telah disediakan dengan cara mengisi kuesioner melalui link dan scan QRcode yang telah disediakan.

2. Seluruh satpel Terminal Tipe A dapat melakukan survey koresponden secara rutin sehingga dapat mengetahui kondisi secara keseluruhan hasil dari survey IKM tersebut.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;

II.2.2.2 IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 12 Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	
IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2023
Target	53,7	
Realisasi	59,02	
Capaian	109,91%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A yang terpenuhi adalah rata – rata dari persentase pemenuhan SPM pada Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Berdasarkan Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Standar Pelayanan Terminal Penumpang Tipe-A mencakup:

- (1) Pelayanan Keselamatan;
- (2) Pelayanan Keamanan;
- (3) Pelayanan Keandalan/Keteraturan;
- (4) Pelayanan Kenyamanan;
- (5) Pelayanan Kemudahan/Keterjangkauan;
- (6) Pelayanan Kesetaraan.

Tabel II.13 Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015

Matriks Penilaian (SPM_{Tn}) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:		
NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP_{keselamatan})		
1	Lajur Pejalan Kaki Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan	2

	<i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
2	Fasilitas Keselamatan Jalan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Jalur Evakuasi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Alat Pemadam Kebakaran Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan	2

	keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		
1	<p>Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
2	<p>Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
3	<p>Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
4	<p>Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
5	<p>Ketersediaan Loket tempat calon penumpang membeli tiket</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loket tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
6	<p>Keteraturan Loket tempat calon penumpang membeli tiket</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila Loket tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	1
7	<p>Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
8	<p>Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai).</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.</p>	2
9	<p>Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2

10	<p>Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	<p>Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)</p> <p>Dukungan pembaca layar diaktifkan.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)</p> <p>Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	2
2	<p>Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.</p>	2
3	<p>Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona)</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.</p>	2
4	<p>Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel).</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
5	<p>Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel).</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
6	<p>Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal)</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
7	<p>Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas)</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
8	<p>Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas)</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
9	<p>Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2

10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	Ketersediaan Area merokok (smoking area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1

3	<p>Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	1
4	<p>Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	1
5	<p>Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	1
6	<p>Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	1
7	<p>Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di tuang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca)</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
8	<p>Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
9	<p>Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca.</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
10	<p>Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada</p> <p>Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.</p>	2
11	<p>Ketersediaan Tempat penitipan barang</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
12	<p>Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner)</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
13	<p>Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus.</p> <p>Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.</p>	1
14	<p>Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)</p>	1

	Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	
ASPEK PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyanggah cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyanggah cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal		100

Sehingga :

SPM TTA

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

Note:

*Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)

SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal

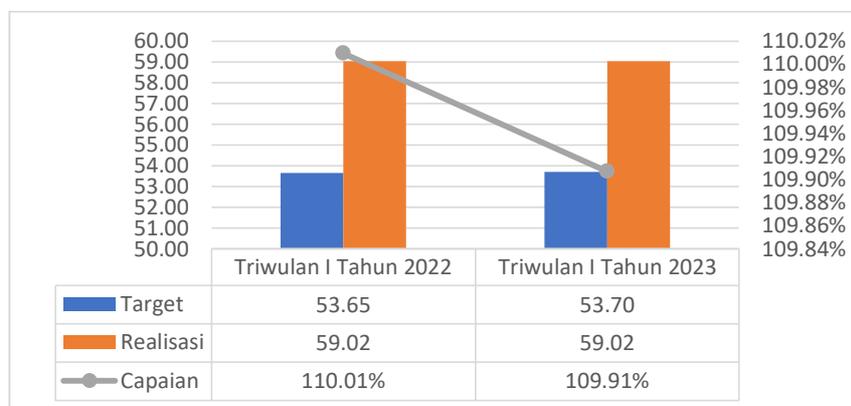
Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat

n = Jumlah Terminal yang beroperasi

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A sebesar 59,02% jika dibandingkan dengan target PK tahun 2023 sebesar 53,7% maka capaian kinerja mencapai 109,91%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**. Grafik Capaian IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A.



Gambar II. 5 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dan Balai Pengelola Transportasi Darat telah melakukan revitalisasi terhadap Terminal Penumpang Tipe A sehingga mengakibatkan persentase SPM Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meningkat karena adanya penambahan dan perbaikan fasilitas umum dan penunjang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sebagai berikut :

Tabel II.14 Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015

Matriks Penilaian (SPMTn) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:		
NO	ASPEK PENGUKURAN	NILAI (POINT)
ASPEK PELAYANAN KESELAMATAN (AP_{keselamatan})		
1	Lajur Pejalan Kaki Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lajur pejalan kaki yang meminimalkan <i>crossing</i> dengan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Fasilitas Keselamatan Jalan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, penerangan jalan umum, pagar). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Jalur Evakuasi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Alat Pemadam Kebakaran Nilai 2 (dua) point apabila tersedia alat pemadam kebakaran. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
5	Pos, fasilitas dan petugas kesehatan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas kesehatan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
6	Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
7	Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, bencana alam dan kecelakaan). Nilai 0 (nol) apabila tidak	2

	tersedia.	
9	Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi ketersediaan fasilitas untuk penanganan darurat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEAMANAN (AP_{keamanan})		
1	Fasilitas pencegah tindak kriminal Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas pencegah tindak kriminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
3	Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Orang yang menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jasa. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEANDALAN/KETERATURAN (AP_{keandalan})		
1	Ketersediaan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Keteraturan Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
3	Ketersediaan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
4	Keteraturan Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis. Nilai 2 (dua) point apabila Jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan dan kendaraan umum tidak dalam trayek lanjutan beserta realisasi jadwal secara tertulis teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2

5	Ketersediaan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Loker tempat calon penumpang membeli tiket. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
6	Keteraturan Loker tempat calon penumpang membeli tiket Nilai 1 (satu) point apabila Loker tempat calon penumpang membeli tiket teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	1
7	Ketersediaan Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
8	Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai). Nilai 2 (dua) point apabila Luas Kantor yang terdapat didalam terminal yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan operasional terminal serta ruang kontrol dan SIM terminal (Luas disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan pegawai) sesuai. Nilai 0 (nol) apabila tidak sesuai.	2
9	Ketersediaan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
10	Keteraturan Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Petugas operasional Terminal yang mengatur operasional terminal teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
ASPEK PELAYANAN KENYAMANAN (AP_{kenyamanan})		
1	Ketersediaan tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 2 (dua) point apabila tersedia tempat duduk pada ruang tunggu yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik bus (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka) Dukungan pembaca layar diaktifkan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
2	Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi area ruang tunggu bersih 100% sejuk dan tidak berbau yang berasal dari area terminal. Nilai 0 (nol) apabila tidak bersih.	2
3	Keteraturan di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia di ruang tunggu (dilakukan kanalisasi penumpang dan diklasifikasikan berdasarkan zona) teratur. Nilai 0 (nol) apabila tidak teratur.	2
4	Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel).	2

	Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Pria (minimal 4 urinoir, 3 WC, 1 WC penyandang disabilitas, 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
5	Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi ketersediaan Jumlah toilet Wanita (minimal 6 WC, 1 WC penyandang disabilitas. 2 wastafel). Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
6	Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Toilet (Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
7	Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas mushola Pria (minimal 11 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) Nilai 2 (dua) point apabila Luas Mushola Wanita (minimal 9 normal dan 2 penyandang disabilitas) terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
9	Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal Nilai 2 (dua) point apabila Kondisi Mushola Area berisi 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam area terminal terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Ketersediaan alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia alat-alat kebersihan, penyiraman tamandi Ruang terbuka hijau. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
11	Tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan Nilai 1 (satu) point apabila tersedia ruang terbuka hijau minimum 30% luas lahan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Kondisi ruang terbuka hijau, Tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia jalur evakuasi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Ketersediaan Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Rumah makan yang memiliki fasilitas rumah makan sesuai kebutuhan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
14	Ketersediaan Fasilitas dan petugas kebersihan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Fasilitas dan petugas kebersihan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
15	Ketersediaan Tempat istirahat awak kendaraan Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Tempat istirahat awak kendaraan. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
16	Ketersediaan Area merokok (smoking area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area merokok (smoking area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2

17	Ketersediaan Drainase yang memadai Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Drainase yang memadai. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
18	Ketersediaan Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area) Nilai 2 (dua) point apabila tersedia Area yang tersedia jaringan internet (hot spot area). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
19	Ketersediaan Ruang baca (reading corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang baca (reading corner). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
20	Tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi Nilai 2 (dua) point apabila tersedia lampu penerangan ruangan dengan intensitas cahaya 300 lux per 100 meter persegi. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	2
ASPEK PELAYANAN KEMUDAHAN/KETERJANGKAUAN (AP_{kemudahan})		
1	Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
2	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpisah.	1
3	Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur pemberangkatan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
4	Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur Nilai 1 (satu) point apabila Letak Jalur kedatangan kendaraan tetap dan teratur terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
5	Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Terpisah dengan jalur penurunan penumpang terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
6	Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain Nilai 1 (satu) point apabila Letak jalur kedatangan kendaraan Tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	1
7	Visual Informasi Pelayanan, antara lain : Denah/Layout terminal, Nomor trayek, nama PO dan Kelas Pelayanannya, Nama terminal keberangkatan, Jadwal, tarif dan Peta Jaringan. (Diletakkan di tempat yang strategis antara lain dekat loket, di pintu masuk dan di ruang tunggu umum, mudah dilihat dan jelas terbaca) Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
8	Audio informasi pelayanan, antara lain : informasi pelayanan dan Kejadian khusus dan gangguan. Diletakkan ditempat yang mudah didengar oleh pengguna jasa dengan intensitas suara 20 dB lebih besar	2

	dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	
9	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan dalam terminal kepada pengguna jasa sekurang-kurangnya memuat: Jenis angkutan, Lokasi angkutan, Jam pelayanan angkutan lanjutan, Jurusan/rute, Tarif. Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca. Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
10	Informasi gangguan perjalanan mobil bus diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada Nilai 2 (dua) point apabila terpenuhi. Nilai 0 (nol) apabila tidak terpenuhi.	2
11	Ketersediaan Tempat penitipan barang Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
12	Ketersediaan Fasilitas pengisian baterai (charging corner) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
13	Aksesibilitas Tempat naik / turun penumpang Memberikan kemudahan penumpang untuk naik ke bus atau turun dari bus. Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
14	Ketersediaan Tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
ASPE PELAYANAN KESETARAAN (AP_{kesetaraan})		
1	Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel) Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Aksesibilitas Fasilitas penyandang cacat (difabel). Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
2	Ketersediaan Ruang ibu menyusui Nilai 1 (satu) point apabila tersedia Ruang ibu menyusui. Nilai 0 (nol) apabila tidak tersedia.	1
Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal		100

- **Narasi Kronologi Target**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A pada tahun 2023 memiliki target pada tahun 2023 sebesar 53,7 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan Terminal Tipe A sebanyak mungkin agar standar terminal bisa merata;
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training kepada Satuan Pelayanan Terminal;
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima pada Terminal melalui kegiatan *Excellent Service*;

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A masih di temukan banyak permasalahan, yang selama tahun 2023 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak di temukan sebagai berikut:

1. Terdapat backlog kegiatan, yang semula terencana menjadi tidak terlaksana;
2. Adanya kerusakan pada fasilitas fisik terminal karena kurang maksimalnya perawatan terminal;
3. Masih terdapat kekurangan SDM pada beberapa terminal.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2023, realisasi kinerja pada triwulan I adalah sebesar 59,02 dengan target kinerja sebesar 53,7.

Sehingga:

$$\begin{aligned} \text{SPM TTA} \\ &= \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

$$\text{realisasi} = \frac{6138}{104} \times 100\% = 59,02\% \dots\dots \text{Lampiran 12}$$

Note:

- *Monitoring dilaksanakan pada saat Proses rehabilitasi selesai dilaksanakan pada tahun (n)
- SPM TTA = Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan (SP) pada masing-masing Terminal Penumpang Tipe A (TTA) yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
- n = Jumlah Terminal yang beroperasi

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A triwulan I tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{59,02}{53,7} \times 100\% = 109,91\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2023 adalah melalui :

Tabel II. 15 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				
IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu :	860.346.000	860.346.000	53.706.569	6,24%
1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan;	539.957.000	539.957.000	53.706.569	9,95%
2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan;	320.389.000	320.389.000	0	0%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan percepatan kegiatan revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A sehingga hasil persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A dapat meningkat.
2. Melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Terminal Tipe A.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang

II.2.2.3 IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 16 Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	
IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2023
Target	78,6	
Realisasi	83,41	
Capaian	106,12%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 6 (enam) item, yaitu : vending machine, passenger barrier gate, vehicle barrier gate, CCTV, counting passenger, information display.

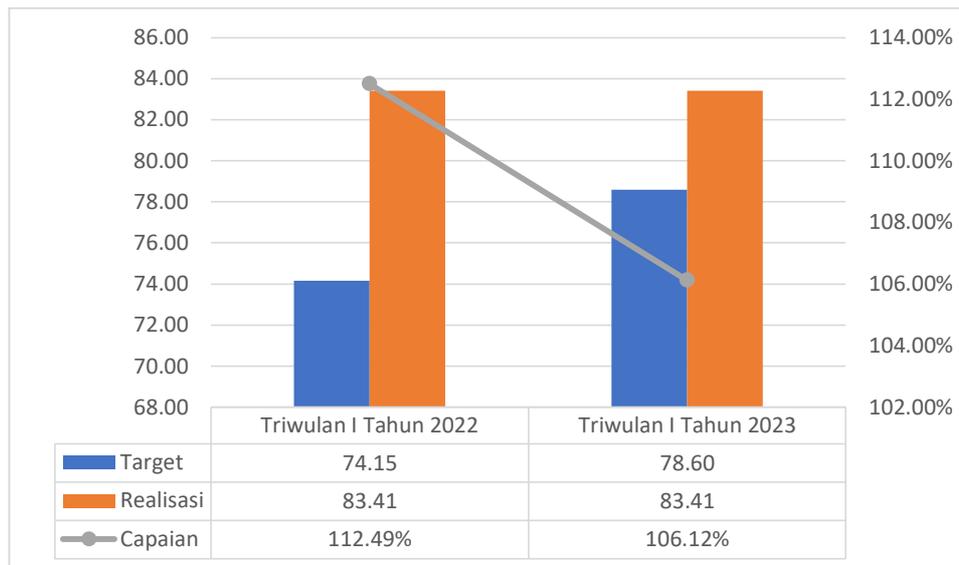
Untuk menghitung IKK Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\%Penerapan\ Smart\ Terminal = \left[\frac{\text{Jumlah TTA Yang Melaporkan Operasional Secara Online}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 74\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,4\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 17,6\% \right]$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A sebesar 83,41% jika dibandingkan dengan target PK tahun 2023 sebesar 78,6% maka capaian kinerja mencapai 106,12%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.6**. Grafik Perbandingan Realisasi dan

Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 3 Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A).



Gambar II. 6 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 3 Persentase penerapan SMART Terminal Penumpang Tipe A)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan:

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 9151 TAHUN 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3171 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Angkutan Jalan. **(Lampiran 13)**

- **Narasi Kronologi Target**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada Tahun 2023 memiliki target 78,6 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan ini meliputi :

1. Menerapkan Terminal Online System (TOS) pada seluruh Terminal Tipe A;
2. Melakukan peningkatan SDM melalui training dan Bimtek terkait Terminal Online System (TOS);
3. Menambah biaya operasional pada satuan pelayanan untuk mendukung terlaksananya smart terminal sehingga persentase penerapan smart terminal dapat meningkat;

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Faktor yang dapat menghambat dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan ini meliputi:

1. Adanya backlog kegiatan, yang semula terencana dalam Renstra tetapi menjadi tidak terlaksana;
2. Belum meratanya penerapan smart terminal pada Terminal Tipe A;
3. Masih kurangnya jumlah SDM yang mampu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait Smart Terminal maupun Terminal Online System (TOS).

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berikut adalah perhitungan realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2023 :

$$\begin{aligned} \% \text{Penerapan Smart Terminal} &= \left[\frac{\text{Jumlah TTA Yang Melaporkan Operasional Secara Online}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 74\% \right] + \\ &\left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,4\% \right] \\ &+ \\ &\left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 17,6\% \right] \\ &= \left[\frac{114}{103} \times 74\% \right] + \left[\frac{8}{103} \times 8,4\% \right] + \left[\frac{5}{103} \times 17,6\% \right] \\ &= 83,41\% \end{aligned}$$

Keterangan:

Penerapan Smart Terminal dibagi menjadi 3 bagian, antara lain :

1. Persentase dari Jumlah Terminal Tipe A Yang Melaporkan Operasional Secara Online dengan bobot 74%
2. Persentase dari Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate dengan bobot 8,4%
3. Persentase dari Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information dan CCTV dengan bobot 17,6%

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2022 terhadap target PK Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{83,41}{78,6} \times 100\% = 106,12\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 17 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat				
IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu :	507.638.000	507.638.000	374.515.982	73,78%
1. Bimtek Rancang Bangun Terminal Angkutan Jalan;	201.172.000	201.172.000	194.791.647	96,83%
2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan;	306.466.000	306.466.000	179.724.335	58,64%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan mengoptimalkan pelaporan operasional Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat secara online dengan memasang perangkat digitalisasi terminal, yaitu melalui percepatan kegiatan Pemanfaatan Terminal Operating System;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan terminal terkait dengan implementasi Terminal Online System dan penginputan data produksi terminal pada aplikasi SIASATI;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.3 SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

• Uraian Kegiatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Tabel II. 17 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1
SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	30	
		Target		25
		Realisasi		31,69
		Capaian		73,24%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

II.2.3.1 IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 18 Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	
IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2023
Target	25	
Realisasi	31,69	
Capaian	73,24%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah angkutan barang yang masuk ke UPPKB.

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:

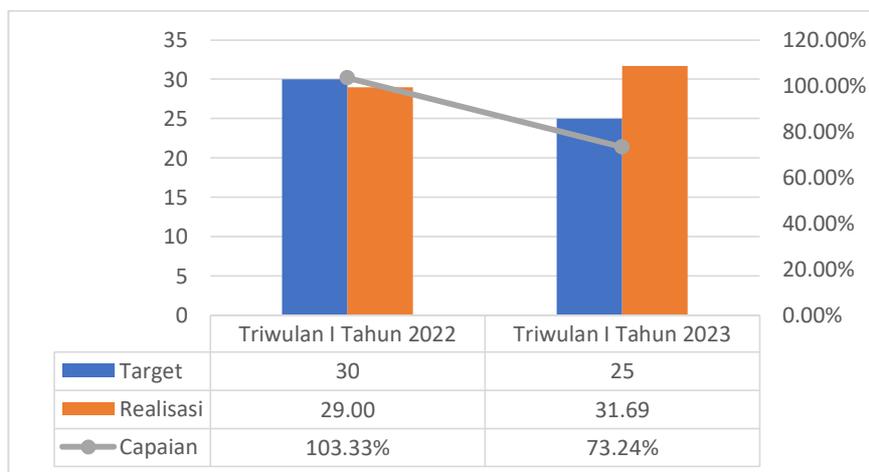
- a. tata cara pemuatan barang;
- b. dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- c. tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- d. dokumen Angkutan Barang;
- e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Untuk menghitung IKK Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah Kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2023 sebesar 31,69% jika dibandingkan dengan target PK tahun 2023 sebesar 25% maka capaian kinerja mencapai 73,24%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.7**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan I tahun 2023).



Gambar II.7 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Triwulan I tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:

- a. tata cara pemuatan barang;
- b. dimensi kendaraan Angkutan Barang;
- c. tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
- d. dokumen Angkutan Barang;
- e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
- f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan sebagai dasar indikator penilaian kinerja UPPKB meliputi :

1. Perdirjen SK-736 Tahun 2017 (Penindakan ODOL)
2. Perdirjen SK-4084 Tahun 2020 (Implementasi SOP UPPKB dan Sistem manajemen Mutu ISO 9001)
3. Permenhub 25 Tahun 2018 (Self Assesment Penilaian Kinerja UPPKB)
4. Permenhub 134 Tahun 2015 (Tipe/ KL S UPPKB untuk Penilaian Sarana Prasarana UPPKB)
5. Permenhub 49 Tahun 2019 (Survey Kepuasan Pelanggan UPPKB)
6. Perdirjen SK-736 Tahun 2017 (SDM dan Produktifitas UPPKB serta Standar Pelayanan Minimal UPPKB)

- **Narasi Kronologi Target**

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Tahun 2022 memiliki target 25 yang diperoleh dari Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan asumsi proyeksi pimpinan pada rapat Rencana Strategis 2020-2024.

- **Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut:

Berikut adalah beberapa faktor keberhasilan yang dapat mendukung dalam pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:

1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM);
2. Sudah terdapat konsep outlook UPPKB;
3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan;
4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB;
5. Melakukan Pemeliharaan JTO;
6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736;
8. Melakukan pengawasan kepada Satpel UPPKB melalui adanya pelaporan data penimbangan secara periodik setiap bulan.

- **Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang menjadi penyebab kegagalan tercapainya IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat:

1. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas;
2. Adanya jaminan keselamatan petugas UPPKB;

3. Masih terdapat beberapa UPPKB yang letaknya sulit untuk dijangkau oleh jaringan internet.

• **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat triwulan I tahun 2023, diperoleh realisasi sebesar 31,69% sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 belum mencapai target PK Tahun 2023.

Sehingga :

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah kendaraan yang masuk UPPKB}} \times 100\%$$

$$= \frac{66.744}{210.591} \times 100\% = 31,69\%$$

*semakin rendah persentase pelanggaran, semakin baik, semakin tinggi persentase pelanggaran, semakin buruk.

• **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{30 - (31,69 - 30)}{30} \times 100\% = 73,24\%$$

• **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 adalah

Tabel II. 19 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				
IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu :	27.261.292.000	27.261.292.000	273.886.690	0,87%

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat				
1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua; 5. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pengadaan Belanja Modal Lainnya (Pemeliharaan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online, Pengadaan Perangkat Penimbangan Kendaraan Bermotor Online dan Penunjang Kinerja Fasilitas Penimbangan				

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Mewujudkan Indonesia bebas ODOL dengan cara melakukan pemasangan fasilitas pendukung sistem jembatan timbang online, pengembangan integrasi JTO dengan sistem weight in motion dan sistem ETLE milik Kepolisian;
2. Meningkatkan kegiatan pengawasan pada pengoperasian dan pengelolaan UPPKB terkait dengan pelanggaran ODOL;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.2.4. SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

• **Uraian Kegiatan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat;

Tabel II. 20 Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1
SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	
		Target		88
		Realisasi		83
		Capaian		94,32%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

II.2.4.1 IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 21 Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	
IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2023

Target	88	
Realisasi	83	
Capaian	94,32%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat merupakan hasil kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan menggunakan uraian bobot menyesuaikan dengan target Ditjen Perhubungan Darat. Salah satu bobot yang mempengaruhi yaitu tingkat penyerapan Anggaran Satuan Kerja dengan menyesuaikan realisasi anggaran Tahun 2023 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

- a) Aspek Perencanaan;
- b) Aspek Kepegawaian (SDM);
- c) Aspek Keuangan;
- d) Aspek Hukum dan Kerjasama.

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Berikut adalah tabel perhitungan nilai bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:

Tabel II. 22 Perhitungan Nilai Bobot pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	35%	
	I SAKIP	20%	
	a Rencana Strategis (Renstra)	4	
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	b Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥1 Januari)		
	c Perjanjian Kinerja (PK)	3	
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 januari)		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
	d Rencana Aksi (Renaksi)	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 januari)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan		

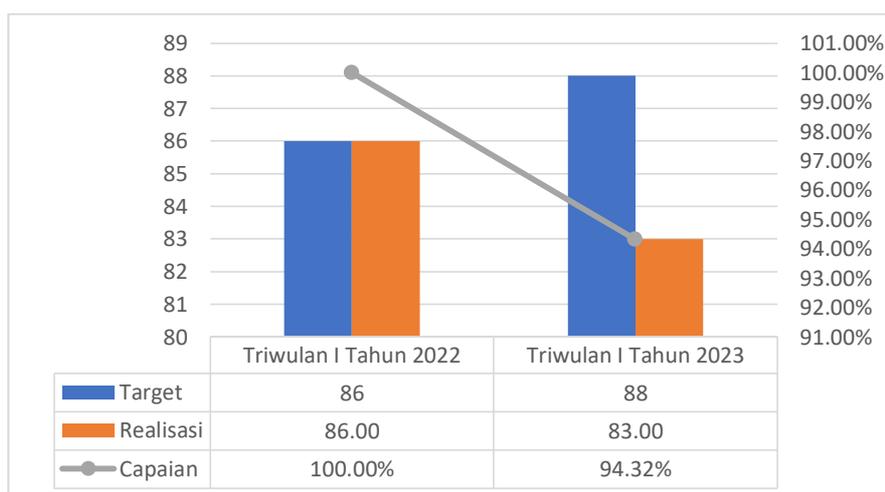
NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III, II, I	2	
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	
b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	
c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	
B	Indeks Profesionalisme ASN	35%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	
2	Kompetensi	14	
3	Kinerja	11	
4	Disiplin	1,5	
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	
	Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
	Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 sebesar 83 jika dibandingkan dengan target PK tahun 2023 sebesar 88 maka capaian kinerja mencapai 94,32%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.8**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023)



Gambar II.8 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

a) Aspek Perencanaan;

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

b) Aspek Kepegawaian (SDM);

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

c) Aspek Keuangan;

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja.

- **Narasi Kronologi Target**

Target pada IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan telah diselesaikan secara tepat waktu;
2. Daya serap anggaran satuan kerja Triwulan I Tahun 2023 sudah mencapai 10,90%;
3. Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK) tahun 2021 sudah tuntas 100%.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang dapat menjadi potensi kegagalan tercapainya IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat:

1. Pelaksanaan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang tidak tepat waktu;
2. Daya serap anggaran satuan kerja yang tidak sesuai target;
3. Pengelolaan dalam melakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara masih kurang maksimal;
4. Masih terdapat Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK) yang belum tuntas.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023, diperoleh realisasi sebesar 83 sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 telah sesuai dengan target PK Tahun 2023.

Sehingga :

Tabel II.23 Keberhasilan Capaian Indikator Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	35%	
	I SAKIP	20%	
	a Rencana Strategis (Renstra)	4	4

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31 Desember)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥ 1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥ 1 Januari)		
c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	3
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (maksimal 20 Januari)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21 Januari – 19 Februari)		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20 Februari)		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III, II, I	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-20 April, 1-20 Juli, 1-20 Oktober)		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	4
b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	4
c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	4
B	Indeks Profesionalisme ASN	35%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	8,5
2	Kompetensi	14	14
3	Kinerja	11	11
4	Disiplin	1,5	1,5
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	5
	Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap $\geq 100\%$		
	Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
	Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	2
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	10
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%		
			83

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{83}{88} \times 100\% = 94,32\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 adalah

Tabel II. 24 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				
IKK 1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 11. Monitoring Evaluasi	21.709.455.000	21.709.455.000	4.155.038.877	19,14%

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat				
Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri 14. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan 15. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 16. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A dan UPPKB di Pulau Jawa 17. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait 18. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran, Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 19. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Base Line) 20. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi 21. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024				

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan peningkatan pelaksanaan penyelenggaraan dukungan teknis agar dapat mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan sesuai dengan target perjanjian kinerja dan rencana strategis serta dapat mendukung tercapainya program kegiatan sesuai dengan DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2023.
2. Meningkatkan kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan target waktu yang ditentukan.
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
4. Meningkatkan pengusulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang tercatat pada SIMAK-BMN Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

II.2.5 SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

• Uraian Kegiatan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

Tabel II. 25 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1
SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	
		Target		73
		Realisasi		74,58
		Capaian		102,16%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

II.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 26 Capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	
IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Tahun 2023

Target	73	
Realisasi	74,58	
Capaian	102,16%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

1. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Umum, sebagaimana dijelaskan yaitu dalam melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumatanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.
2. Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang bertempat di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
3. Pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada stakeholders (Pimpinan dan pegawai) di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai implikasi dari tugas dan fungsi yang diampu Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Sumber Data pada Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui hasil kuesioner sebagai berikut:

1. Hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Terhadap Kinerja Layanan Perkantoran yang ditujukan kepada setiap Pegawai yang bertempat di Kantor Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
2. Hasil kuesioner assessment (penilaian sendiri) yang ditujukan kepada internal sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil kuesioner Kualitas Penyelenggaraan Perkantoran di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Cara Menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui perhitungan sebagai berikut :

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (25%);
 - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
 - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

Tabel II.27 Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%	
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10	
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8	

	3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7	
B	Tingkat Kepuasan Staf		25%	
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran		50%	
	1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20	
	2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15	
	3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15	

Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV diukur melalui kuesioner terlampir

FORM A1

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN**

SATUAN KERJA

NAMA :

JABATAN :

NIK :

A. PERKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atas tingkat pelayanan Layanan Perkantoran, dengan indikator: 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						

Ket: diisi dengan tanda centang (✓) pada pilihan persepsi.

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuisoner berikut :

FORM A1

**KUESIONER TINGKAT KEPUASAN
PENYELENGGARAAN PERKANTORAN**

SATUAN KERJA

NAMA :

JABATAN :

NIK :

A. PERKANTORAN

1. Berikut merupakan persepsi atas tingkat pelayanan Layanan Perkantoran, dengan indikator 1 (Tidak Nyaman/Baik), 2 (Kurang Nyaman/Baik), 3 (Cukup), 4 (Nyaman/Baik), 5 (Sangat Nyaman/Baik) adalah sebagai berikut:

NO	ASPEK PENILAIAN/URAIAN	PERSEPSI				
		1	2	3	4	5
1	Kondisi Ruang Kerja					
2	Kebersihan Ruang Kerja					
3						
4						
5						
6						

Ket: diisi dengan tanda centang (✓) pada pilihan persepsi.

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{95}{83} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

$$x = \frac{50}{83} \times 100\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata - rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2,31}{5} \times 100\%$$

Note:

- *) Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf di Kantor) = Jumlah Seluruh Pegawai – Pegawai Perbantuan Pegawai Perbantuan = Pegawai Kebersihan + Driver + Pramubakti + Security
- ***) Rata-rata kecepatan internet (unduh) di kantor merupakan rata-rata kecepatan pengunduhan (download) yang diukur pada jam kantor (08-16), pada waktu tertentu dengan sample sekurang-kurangnya 5 lokasi/PC/Laptop di kantor
- ***) Standar Kecepatan Internet (unduh) di Kantor sebesar 5 Mbps

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Triwulan I Tahun 2023 sebesar 74,58 jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 73 maka capaian kinerja mencapai 102,16%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.9**. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023.



Gambar II.9 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan memperhitungkan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Kegiatan yang termasuk dalam Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, yaitu kegiatan layanan perkantoran dan pengadaan belanja modal lainnya.

- **Narasi Kronologi Target**

Target pada IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2020-2024.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan survey tingkat kepuasan baik kepada pejabat, maupun staf terkait layanan perkantoran;
2. Meningkatkan ketersediaan pc/laptop dengan menyesuaikan jumlah pegawai;
3. Meningkatkan kecepatan internet (unduh) di kantor.
4. Meningkatkan kesadaran antar pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang dapat menjadi potensi kegagalan tercapainya IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023:

1. Ketersediaan PC/laptop masih belum sesuai dengan jumlah pegawai;
2. Kecepatan fasilitas unduh internet masih dibawah standar kecepatan internet;
3. Diperlukan kesadaran pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan oleh unit kerja.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023, diperoleh realisasi sebesar 74,58 sehingga capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2023 telah sesuai dengan target PK Tahun 2023.

Sehingga :

Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

NO	URAIAN	BOBOT	HASIL PERHITUNGAN	NILAI	BULAN											
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
A	Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV	25%														
1	Tingkat kepuasan Pejabat Eselon II	10%	70,0	7,00	7,00	7,00	7,00									
2	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon III	8%	70,0	5,60	5,60	5,60	5,60									
3	Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV	7%	70,0	4,90	4,90	4,90	4,90									
B	Tingkat Kepuasan Staf	25%	70,0	17,50	17,50	17,50	17,50									
C	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran	50%														
1	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x)	20%	114,46	22,89	22,62	22,62	22,89									
2	Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)	15%	65,06	9,76	9,64	9,64	9,76									
3	Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)	15%	46,2	6,93	6,93	6,93	6,93									
TOTAL NILAI				74,58	74,19	74,19	74,58	0,00								

Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III, dan IV

1. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II = $70 \times 10\%$ (bobot) = **7**
 2. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III = $70 \times 8\%$ (bobot) = **5,60**
 3. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon IV = $70 \times 7\%$ (bobot) = **4,90**
- Tingkat Kepuasan Staf = $70 \times 25\%$ = **17,50**

Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

$$x = \frac{95}{83} \times 100\%$$

$$X = 114,46 \times 20\% \text{ (bobot)} = \mathbf{22,89}$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

$$x = \frac{54}{83} \times 100\%$$

$$X = 65,06 \times 15\% \text{ (bobot)} = \mathbf{9,76}$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata-rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

$$x = \frac{2,31}{5} \times 100\%$$

$$X = 46,2 \times 15\% \text{ (bobot)} = \mathbf{6,93}$$

$$\text{Totak Nilai} = \mathbf{7,00 + 5,60 + 4,90 + 17,50 + 22,89 + 9,76 + 6,93 = 74,58}$$

• **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2022 terhadap target revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{74,58}{73} \times 100\% = 102,16\%$$

• **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 adalah :

Tabel II. 28 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW I	REALISASI TW I	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
WA. Program Dukungan Manajemen				
SK 1. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel				
IKK 1. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.657.588.000	6.657.588.000	1.169.116.882	17,56%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan layanan perkantoran;
2. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan target rencana penarikan dana yang ada.
3. Meningkatkan pengawasan pada kegiatan layanan perkantoran.
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

II.3 Realisasi Anggaran**II.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023****II.3.1.1 Pagu Anggaran****a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023**

- 1) Pagu Awal DIPA TA. 2023 sebesar **Rp 58.794.522.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 29 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2023

	Rp.	58.794.522.000	100,00%
PNBP	Rp.	-	0,00%
SBSN	Rp.	-	0,00%
Total	Rp.	58.794.522.000	100,00%

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Sumber Dana pada Triwulan I Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp58.794.522.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 30 Rincian per Sumber Dana Pagu Triwulan I TA. 2023

RM	Rp.	58.794.522.000	100,00%
PNBP	Rp.	0	0,00%
SBSN	Rp.	0	0,00%
Total	Rp.	58.794.522.000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023

Pagu Awal DIPA TA. 2023 sebesar **Rp 58.794.522.000,-** dengan rincian per Jenis Belanja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel II. 31 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2023

Belanja Pegawai	Rp.	-	0,00%
Belanja Barang	Rp.	48.797.323.000	83,00%
Belanja Modal	Rp.	9.997.199.000	17,00%
Total	Rp.	58.794.522.000	100,00%

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Jenis Belanja Triwulan I T.A. 2023 adalah sebesar **Rp58.794.522.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 32 Rincian per Jenis Belanja Pagu Triwulan I TA. 2023

Belanja Pegawai	Rp.	0	0,00%
Belanja Barang	Rp.	51.021.323.000	86,78%
Belanja Modal	Rp.	7.773.199.000	13,22%
Total	Rp.	58.794.522.000	100,00%

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Pada triwulan I Tahun 2023 terdapat revisi anggaran pada Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berupa Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.002/1/12/DRJD/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Usulan Revisi Anggaran T.A. 2023.

II.3.1.2. Refocussing/ Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2022

Terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sesuai surat DJA sebagai berikut:

1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.002/1/12/DRJD/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Usulan Revisi Anggaran T.A. 2023 dengan Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap pada DIPA Satker-Satker di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, TA 2023 (Revisi ke-1);

Pada Tahun 2023 terdapat revisi Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dengan pagu anggaran masih sama sebesar Rp. 58.794.522.000,00.

Tabel II. 33 Histori Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2023

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	58.794.522.000	-	-	58.794.522.000
REVISI KE-1	58.794.522.000	-	-	58.794.522.000

Tabel II. 34 Histori Revisi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	-	48.797.323.000	9.997.199.000	58.794.522.000
REVISI KE-1	-	51.021.323.000	7.773.199.000	58.794.522.000

Tabel II. 35 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	48.797.323.000	-2.224.000.000	51.021.323.000
Belanja Modal	9.997.199.000	2.224.000.000	7.773.199.000
TOTAL	58.794.522.000	-	58.794.522.000

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi).

Tabel II. 36 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2023

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	25.227.734.000	25.227.734.000	3.057.664.058	12,12%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	25.227.734.000	25.227.734.000	3.057.664.058	12,12%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	33.566.788.000	33.566.788.000	3.353.791.882	14,12%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	9.070.700.000	9.070.700.000	-	0,00%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	23.746.088.000	23.746.088.000	3.353.791.882	14,12%
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	750.000.000	750.000.000	0	0,00%
GRAND TOTAL		58.794.522.000	58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%

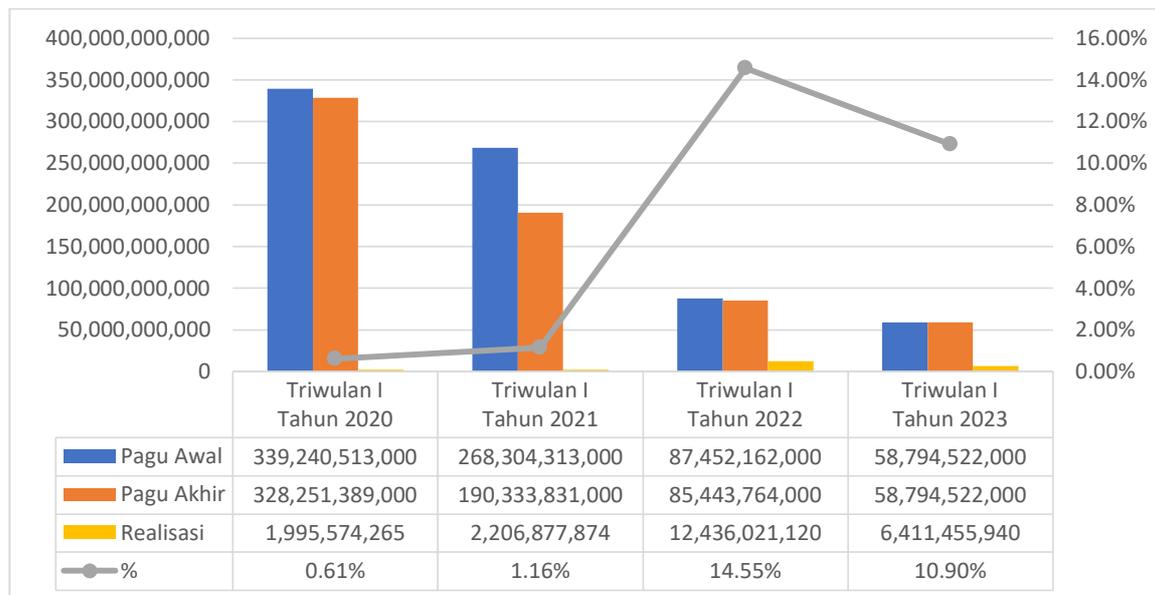
Sumber: Data diolah dari Direktur Prasarana Transportasi Jalan

II.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 37 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2023
(Triwulan I)

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	339.240.513.000	328.251.389.000	1.995.574.265	0,61%
2	2021	268.304.313.000	190.333.831.000	2.206.877.874	1,16%
3	2022	87.452.162.000	85.443.764.000	12.436.021.120	14,55%
4	2023	58.794.522.000	58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%



Gambar II. 38 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar Rp1.995.574.265,- atau mencapai 0,61% dari pagu akhir Rp328,251,389,000,-. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat serapan anggaran Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar Rp2.206.877.874,- atau mencapai 1,16% dari pagu akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp190,333,831,000,-. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat serapan anggaran Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar Rp12.436.021.120,- atau mencapai 14,55% dari pagu akhir tahun 2022 yaitu sebesar Rp85.443.764.000,-. Pada tahun 2023 tingkat serapan anggaran Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar Rp6.411.455.940,- atau mencapai 10,90% dari pagu akhir tahun 2023 yaitu sebesar Rp58.794.522.000,-

II.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

II.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel II.38 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
022.03.GA	Program Infrastruktur Konektivitas	25.227.734.000	25.227.734.000	3.057.664.058	12,12%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	25.227.734.000	25.227.734.000	3.057.664.058	12,12%
022.03.WA	Program Dukungan Manajemen	33.566.788.000	33.566.788.000	3.353.791.882	14,12%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	9.070.700.000	9.070.700.000	-	0,00%
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	23.746.088.000	23.746.088.000	3.353.791.882	14,12%
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	750.000.000	750.000.000	-	0,00%
GRAND TOTAL		58.794.522.000	58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Triwulan I Tahun 2023 sebesar 6.411.455.940,- atau sebesar 10,90%.

II.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dan Per Jenis Sumber Dana Tahun 2023

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2023 yang sudah di analisis per Triwulan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 39 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan I 2023

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI	REALISASI TW I	
		(TW I)		
		Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Barang	51.021.323.000	6.411.455.940	12,57%
3	Belanja Modal	7.773.199.000		0,00%
TOTAL		58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2023 dari Triwulan I sebesar Rp6.411.455.940,- atau sebesar 10,90%

Tabel II. 40 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Triwulan I 2023

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I	
		Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%
2	PNBP	-	-	0.00%
3	SBSN	-	-	-
TOTAL		58.794.522.000	6.411.455.940	10,90%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2023 dari Triwulan I sebesar Rp6.411.455.940,- atau sebesar 10,90%.

II.3.2.3 Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 41 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA
		Rp. 58.794.522.000	Rp. 6.411.455.940	Rp. 52.383.066.060
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	0	0	0
2	Kegiatan yang Terblokir	0	0	0
3	Kontraktual	40.356.621.000	2.249.820.000	38.106.801.000
	a. Belanja Barang	32.994.922.000	2.249.820.000	30.745.102.000
	b. Belanja Modal	7.361.699.000	0	7.361.699.000
4	Non Kontraktual	18.437.901.000	4.094.615.940	14.343.285.060
	a. Belanja Barang	18.026.401.000	4.094.615.940	13.931.785.060
	b. Belanja Modal	411.500.000	0	411.500.000
5	Sisa Belanja Pegawai	0	0	0
TOTAL		Rp. 58.794.522.000	Rp. 6.411.455.940	Rp. 52.383.066.060

Dari total pagu anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar Rp. 58.794.522.000,- (Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) yang dapat terealisasi sebesar Rp.6.411.455.940,- (Enam Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 10,90%.

Pada triwulan I tahun 2023, terdapat 18 (delapan belas) kegiatan kontraktual dengan 1 (satu) kegiatan sudah kontrak dan 17 (tujuh belas) kegiatan belum kontrak.

II.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

II. 3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran program per Triwulan I Tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II. 42 Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Triwulan I		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)
1	SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	100,00%	13,00%	87,00%
2	SK2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	110,54%	15,01%	95,53%
3	SK3 Meningkatkan Keselamatan Transportasi Darat	73,24%	0,87%	72,37%
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	94,32%	13,14%	81,18%
5	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	102,16%	12,49%	89,67%
Total		96,05%	10,90%	85,15%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 96,05%, dengan realisasi anggaran sebesar 10,90% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 85,15%.

II. 3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel II. 56 Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Sasaran Kegiatan	Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (posisi triwulan I)
1	SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	25	19	17%	100,00%	24,00%
2	SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25	15	60%	110,54%	50,54%
3	SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	25	14	56%	73,24%	17,24%
4	SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	30	28	93%	94,32%	0,99%
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20	7	35%	102,16%	67,16%
Total		125	83	64%	96,05%	31,99%

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Triwulan I sebesar 96,05%, dengan Capaian Sumber Daya Manusia menunjukkan adanya efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar 31,99%, dimana walaupun masih ada kekurangan Sumber Daya Manusia tetapi masih bisa mencapai target kinerja.

II.3.3.3 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023:

1. Terdapat *Automatic Adjustment* anggaran untuk kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda pada KSPN Borobudur, Mandalika, dan Likupang Tahun Anggaran 2023 sehingga mengakibatkan tidak bertambahnya capaian kinerja indikator kinerja kegiatan Persentase penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda.
2. Membutuhkan koordinasi yang lebih intens dan komprehensif dengan stakeholder terkait agar kegiatan monitoring atau evaluasi menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi kerjanya maupun realisasi anggaran.
3. Berdasarkan hasil review secara periodik, dibutuhkan adanya monitoring kinerja dan evaluasi kegiatan sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.



BAB III
PENUTUP



III.1 Penutup

III.1.1 Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kegiatan, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Beberapa poin yang dapat disampaikan pada Laporan Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 ini, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($SK \geq 100\%$) dan 2 (dua) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq SK < 100\%$)
2. Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2023, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari 9 (sembilan) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 7 (tujuh) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% ($IKP \geq 100\%$) dan 2 (dua) status merah dengan kondisi kurang dari 100% ($0\% \leq IKP < 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan I tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% (IKK $\geq 100\%$):

- 1) Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi **0,62** (target tahun 2023 sebesar 0,62), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
- 2) Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar **105** lokasi (target tahun 2023 sebesar 105 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
- 3) Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar **12** lokasi (target tahun 2022 sebesar 11 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **109,09%**;
- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **94,93%** (target tahun 2023 sebesar 81,00) dengan Capaian Kinerja sebesar **115,60%**;
- 5) Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **59,02%** (target tahun 2023 sebesar 53,7%), dengan capaian kinerja sebesar **109,91%**;
- 6) Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi **83,41%** (target tahun 2023 sebesar 78,6%), dengan capaian kinerja sebesar **106,12%**;
- 7) Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi **74,58** (target tahun 2023 sebesar 73), dengan capaian kinerja sebesar 102,16%;

Indikator Kinerja Kegiatan dengan kondisi kurang dari 100% (0% ≤ IKP < 100%) :

- 1) Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar **31,69%** (target tahun 2023 sebesar 25%), dengan capaian kinerja sebesar **73,24%**.
- 2) Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar **83** (target tahun 2023 sebesar 88), dengan capaian kinerja sebesar **94,32%**;

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran Kinerja adalah sebesar **96,05%** dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebesar **100,15%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala.

3. Total pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada TA. 2023 adalah sebesar Rp58.794.522.000,00 dengan realisasi anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp6.411.455.940,00 (10,90%);
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
 - b. Melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka penyerapan realisasi anggaran;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
 - d. Memaksimalkan peran SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi demi tercapainya target capaian kinerja.

III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel III. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)
1	S K 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,62	0,62	0,62	100,00%	TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	105	105	100,00%	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan operasional Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang untuk Umum melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsistensi jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu sebesar 105 Terminal. 2. Menetapkan lokasi terminal tipe A dan Terminal Barang Untuk Umum baru sesuai dengan skala prioritas berdasarkan hasil pengkajian lebih lanjut; 3. Meningkatkan kegiatan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A. 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 5. Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik; 6. Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/demand yang cukup besar. 7. Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi Immigration, Customs, Quarantine and Security (ICQS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani ekspor impor harus memiliki izin ICQS. 	Subdit Terminal Angkutan Jalan	
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Lokasi	12	12	12	100,00%	TERCAPAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 2. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasional; 3. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas. 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD. 	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	
2	S K 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00	81,00	93,64	115,60%	TERCAPAI	Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terkait pelayanan terminal melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya. 2. Tersedianya aplikasi Aplikasi 3A IPK-IKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa Terminal Tipe A. 3. Perbaikan layanan antara lain perbaikan sarana dan prasarana; 4. Mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa; 	Subdit Terminal Angkutan Jalan	

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,7	53,7	59,02	109,91%	TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A melalui : 1. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan Terminal Tipe A sebanyak mungkin agar standar terminal bisa merata; 2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training kepada Satuan Pelayanan Terminal; 3. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima pada Terminal. 4. Melakukan evaluasi paruh waktu renstra.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,6	78,6	83,41	106,12%	TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal meliputi: 1. Menerapkan Terminal Online System (TOS) pada seluruh Terminal Tipe A; 2. Melakukan peningkatan SDM melalui training dan Bimtek terkait Terminal Online System (TOS); 3. Menambah biaya operasional pada satuan pelayanan untuk mendukung terlaksananya smart terminal sehingga persentase penerapan smart terminal dapat meningkat.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
4	S K 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25	25	31,69	73,24%	TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM); 2. Sudah terdapat konsep outlook UPPKB; 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan; 4. Membuat Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Melakukan Pemeliharaan JTO; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736; 7. Melakukan pengawasan kepada Satpel UPPKB melalui adanya pelaporan data penimbangan secara periodik setiap bulan.	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
5	S K 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	88	83	94,32%	TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan cara: 1. Pada aspek perencanaan akan melaksanakan penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan secara tepat waktu; 2. Pada aspek kepegawaian, melakukan <i>updating</i> sistem kepegawaian, membuat laporan bulanan kinerja pegawai setiap bulan melalui AP2Kp, dan membuat penilaian kinerja pegawai setiap akhir tahun. 3. Pada aspek keuangan, melakukan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan rapat Kemajuan Realisasi Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang rutin dilaksanakan pada hari senin.	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha
5	S K 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	73	73	74,58	102,16%	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, meliputi: 1. Terdapat pengadaan PC dan Printer pada Tahun Anggaran 2023; 2. Menambah kecepatan jaringan internet untuk memudahkan kegiatan layanan perkantoran.	Subbag Tata Usaha

LAMPIRAN



RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1 Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.67
		IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111
		IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	lokasi	20
2	SK.2 Meningkatnya Kinerja pelayanan Transportasi Darat	IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81.00
		IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53.70
		IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78.60
3	SK.3 Meningkatnya keselamatan Transportasi Darat	IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25
4	SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	nilai	88
5	SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	nilai	73

Jakarta, 2 Desember 2022

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Ir. M. POPIK MONTANASYAH., M.T.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630910 199203 1 003



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	PARAF PERSETUJUAN	PIC	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	SK.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.67		Subdit Terminal Angkutan Jalan
							Subdit Faspim
		IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	111		Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	lokasi	20		Subdit Faspim
2	SK.2 Meningkatkan Kinerja pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81		Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	54		Subdit Terminal Angkutan Jalan
		IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	79		Subdit Terminal Angkutan Jalan
3	SK.3 Meningkatkan keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25		Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
4	SK.5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	nilai	88		Subdit Terminal Angkutan Jalan,
							Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
							Subdit Faspim
							Subdit KP
							Subbag Tata Usaha
5	SK.1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	nilai	73		Subbag Tata Usaha

Jakarta, 2 Desember 2022

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI

Ir. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196309101992031003



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

PERJANJIAN KINERJA

2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. M. Popik Montanasyah., M.T.

Jabatan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiarno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 3 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pihak Pertama
Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Ir. M. POPIK MONTANASYAH., M.T.
NIP. 19630910 199203 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	2		3		4	5
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,62
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	105
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	lokasi	12
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	%	81,00
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	53,70
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	78,60
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	25
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	nilai	88
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	nilai	73

Kegiatan

Anggaran

1. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	25.227.734.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp.	9.070.700.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	23.746.088.000,00
4. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp.	27.218.804.000,00

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, 3 Januari 2023

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Ir. M. POPIK MONTANASYAH., M.T.
NIP. 19630910 199203 1 003



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

(1)	(2)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB										
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12												
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)												
1	SK.1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rasio	0,62	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan;	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	865.307.000	Subdit TAJ Subdit Fasdim			
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	105	Monitoring Operasional dan Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	500.000.000	Subdit TAJ			
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	12	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survey Inventarisasi dan Pendataan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan;	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	432.896.000	Subdit Fasdim			
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A	(%)	81	Survey Kinerja Pelayanan di Terminal Tipe A	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	860.346.000	Subdit TAJ			
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	(%)	53,7	1. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Angkutan Jalan 2. Uji Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	507.638.000	Subdit TAJ			
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	(%)	78,6	1. Buntek Rancangan Bangun Terminal Angkutan Jalan 2. Bimbingan Teknis Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	78,6	27.261.292.000	Subdit PKB			
3	SK.3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	(%)	25	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua 5. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua 6. Pengadaan Belanja Modal Lainnya (Pemeiharaan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online, Pengadaan Perangkat Penimbangan Kendaraan Bermotor Online dan Pemunjang Kinerja Fasilitas Penimbangan	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	21.709.455.000	Subdit TAJ Subdit PKB Subdit Fasdim Subdit KP Subbag Tata Usaha		
4	SK.5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	88	1. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjakasakan 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyediaan dan Transaksi Kegiatan KPB Prasarana Transportasi Jalan 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan 13. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri 14. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan 15. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 16. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Terminal Tipe A dan UPPKB di Pulau Jawa 17. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, Serta Instansi Terkait 18. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran, Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 19. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Base Line) 20. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, Renstra) dan Reformasi Birokrasi 21. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	6.657.588.000	Subbag Tata Usaha
5	SK.1	Meningkatnya Birokrasi Dijet Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat	Nilai	73	1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	6.657.588.000	Subbag Tata Usaha			

Jakarta, 3 Januari 2023

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

H. M. POPIK MONTANASYAH, M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630210 199203 1 003

**MONITORING ATAS RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2023**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PK	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN	TARGET BULAN-1				REALISASI BULAN-1				% CAPAIAN BULAN-1				TARGET BULAN-2				REALISASI BULAN-2				% CAPAIAN BULAN-2				TARGET BULAN-3				REALISASI BULAN-3				% CAPAIAN BULAN-3				EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PENCINGAN NG JAWAB
								TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN ANGGARAN		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN ANGGARAN		TARGET ANGGARAN		REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN ANGGARAN																
								(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)													
1	Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antar moda Transportasi	IX.1	rasio	0.62	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan;	Rasio Simpul strategi nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	0.62	0.62	100	865,307,000	100	0.62	87,941,180	100.00%	7.9%	0.62	100	865,307,000	100.00%	0.62	188,228,670	100.00%	20.83%	0.62	100	865,307,000	100.00%	0.62	274,901,790	100.00%	31.77%	TERCAPAI	Memperbaiki dan meningkatkan kegiatan yang mendukung dengan pemetaan simpul prasarana transportasi jalan.	Subst Terminal Angkutan Jalan dan Subst Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda												
							105	105	100	500,000,000	100	105	-	100.00%	0.00%	105	100	500,000,000	100.00%	105	10,000,000	100.00%	2.00%	105	100%	500,000,000	100.00%	105	37,700,255	100.00%	7.54%	TERCAPAI	Kebijakan terhadap operasional Terminal Perumpang Tipe A yang beroperasi Januari 2022 sama dengan jumlah Terminal Perumpang Tipe A dan Terminal Barang untuk tahun yang beroperasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 124 Terminal.	Subst Terminal Angkutan Jalan												
							12	12	100	432,896,000	100	12	30,000,000	100.00%	6.93%	12	100	432,896,000	100.00%	12	42,972,240	100.00%	9.93%	12	100%	432,896,000	100.00%	12	108,588,895	100.00%	25.08%	TERCAPAI	1. Hersonus upaya untuk perbaikan dan penguatan fasilitas pendukung dan integrasi moda. 2. Memastikan 100% biaya perbaikan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai nilai planing yang masuk pada budgeting anggaran nasional. 3. Pengadaan peralatan terhadap pihak ketiga agar pemeliharaan fasilitas pendukung dapat berjalan sesuai dengan target dan nilai planing. 4. Melakukan pemantauan dan audit terhadap pemeliharaan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh SP2D.	Subst Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda												
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	IX.1	%	81	1. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 2. Survey Inventarisasi dan Pendetakan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Transportasi Jalan;	Perentase Penedakan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	81	81	100	432,896,000	100	81	115.67%	-	81	100	432,896,000	100.00%	94.80	-	117.04%	-	81	100%	432,896,000	100.00%	81	108,588,895	100.00%	25.08%	TERCAPAI	Melakukan rekabidang Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	Subst Terminal Angkutan Jalan													
							53.7	53.7	100	860,346,000	100	59.02	10,000,000	109.91%	1.16%	53.7	100	860,346,000	100.00%	59.02	20,000,000	109.91%	2.32%	53.7	100%	860,346,000	100.00%	59.02	51,706,560	109.91%	6.24%	TERCAPAI	Memperbaiki fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A	Subst Terminal Angkutan Jalan												
							78.6	78.6	100	507,638,000	100	83.41	106.12%	0.00%	78.6	100	507,638,000	100.00%	83.41	124,028,647	106.12%	24.43%	78.6	100%	507,638,000	100.00%	83.41	374,515,982	106.12%	73.78%	TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Perumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem pelayanan penumpang.	Subst Terminal Angkutan Jalan													
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	IX.1	%	25	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Peningkatan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua 5. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua 6. Pengadaan Bidang Modal Lainnya (Pemeliharaan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online, Pengadaan Perangkat Penimbangan Kendaraan Bermotor Online dan Penunjang Kinerja Fasilitas Penimbangan	Perentase Peningkatan pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	25	25	100	27,261,292,000	100	30.25	34,242,000	0.13%	0.13%	25	100	27,261,292,000	100.00%	30.17	116,590,500	131.47%	0.43%	25	100%	27,261,292,000	100.00%	30.17	237,886,690	79.32%	0.87%	BELUM TERCAPAI	Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Jember dan Blora)	Subst Penimbangan Kendaraan Bermotor												
							88	88	100	21,709,455,000	100	83	129,044,960	94.32%	0.99%	88	100	21,709,455,000	100.00%	83	1,029,704,998	94.32%	4.74%	88	100%	21,709,455,000	100.00%	83	4,155,038,877	94.32%	19.14%	BELUM TERCAPAI	Memperbaiki pemeliharaan peralatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subst Terminal Angkutan Jalan, Subst Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subst Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subst Konektivitas Prasarana, Subst TPA Uluha												
							73	73	100	6,657,588,000	100	74.19	107,230,000	101.63%	2.89%	73	100	6,657,588,000	100.00%	74.19	828,045,422	101.63%	12.44%	73	100%	6,657,588,000	100.00%	74.46	1,189,116,382	102.00%	17.56%	TERCAPAI	Memperbaiki kegiatan layanan pelanggan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subst TPA Uluha												
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Darat	IX.1	Nilai	88	1. Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana 2. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 4. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor 5. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Bimbingan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda 7. Sosialisasi Penyelenggaraan Fasilitas Produksi dan Integrasi Moda 8. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Diberjasmakan 9. Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan 10. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 11. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Kerjasama Prasarana LLAJ 12. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan 13. Koordinasi Kelayakan Dalam Negeri 14. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan 15. Monitoring dan Dukulasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 16. Monitoring Dukungan Anggaran Lebarasan, Nalal dan Tahun Baru	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	88	88	100	21,709,455,000	100	83	129,044,960	94.32%	0.99%	88	100	21,709,455,000	100.00%	83	1,029,704,998	94.32%	4.74%	88	100%	21,709,455,000	100.00%	83	4,155,038,877	94.32%	19.14%	BELUM TERCAPAI	Memperbaiki pemeliharaan peralatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subst Terminal Angkutan Jalan, Subst Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subst Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subst Konektivitas Prasarana, Subst TPA Uluha												
							73	73	100	6,657,588,000	100	74.19	107,230,000	101.63%	2.89%	73	100	6,657,588,000	100.00%	74.19	828,045,422	101.63%	12.44%	73	100%	6,657,588,000	100.00%	74.46	1,189,116,382	102.00%	17.56%	TERCAPAI	Memperbaiki kegiatan layanan pelanggan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subst TPA Uluha												
							73	73	100	6,657,588,000	100	74.19	107,230,000	101.63%	2.89%	73	100	6,657,588,000	100.00%	74.19	828,045,422	101.63%	12.44%	73	100%	6,657,588,000	100.00%	74.46	1,189,116,382	102.00%	17.56%	TERCAPAI	Memperbaiki kegiatan layanan pelanggan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Subst TPA Uluha												

LAMPIRAN LMCK TRIWULAN I TAHUN 2023
TERKAIT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PADA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

1. Lampiran 1_KM_109_TAHUN_2019 ttg Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A;
- 1a. PM_102_TAHUN_2018 ttg Penyelenggaraan Terminal Barang
2. Lampiran 2_KP 75 Tahun 2016 ttg Penlok Terminal Entikong
3. Lampiran 3_KM_44_TAHUN_2019 ttg Penlok Terminal Barang untuk Umum Nanga Badau
4. Lampiran 4_KM_45_TAHUN_2019 ttg Penlok Terminal Barang untuk Umum Aruk
5. Lampiran 5_KM_139_Tahun_2021 ttg Penlok Terminal Barang untuk Umum NTT & Papua (Motaain, Motamasin, Wini, Skouw)
6. Lampiran 6_Perpres Nomor 18 Tahun 2020 ttg RPJMN 2020 – 2024
7. Lampiran 7_Perpres Nomor 109 Tahun 2020 ttg Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
8. Lampiran 8_PM 80 Tahun 2020 ttg Renstra Kemenhub 2020-2024
9. PP_no._79_tahun_2013 ttg Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
10. PM_40_Tahun_2015 ttg Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang
11. PM_18_TAHUN_2021 ttg Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan PKB
12. PM_67_tahun_2021_Organisasi _ Tata Kerja Kemenhub_Pasal 158 _ 159_dan bagan hal 365
13. PM 17 TAHUN 2022 ttg Tata Kerja Kemenhub
14. KEPDIRJEN NO.KP-DRJD 9151 TAHUN 2022 ttg Pedoman Teknis Sistem Informasi Manajemen Terminal AJ

Dapat di download melalui link <https://intip.in/DasarHukumDPTJ2022>

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Maret 2023

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS						
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN						
			Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)	
10 Destinasi Pariwisata Prioritas	1	1	KSPN Danau Toba				Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Danau Toba (TA. 2022)	1	1
	2	2	KSPN Tanjung Kelayang						
	3	3	KSPN Borobudur	1. Terminal Purworejo 2. Terminal Tidar		1	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang (TA. 2020) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo (TA. 2020) 3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten (TA. 2020) 4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga (TA. 2020) 5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)	1	1
	4	4	KSPN Bromo Tengger Semeru	3. Terminal Pandaan Pasuruan 4. Terminal Banyuwangga - Kota Probolinggo		1			1
	5	5	KSPN Mandalika	5. Terminal Mandalika - Kota Mataram		1	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021) 2. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD untuk mendukung penyelenggaraan Moto GP)	1	1
	6	6	KSPN Lab Bajo				12. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Lab Bajo	1	1
	7	7	KSPN Likupang	6. Terminal Liwas		1			1
	8	8	KSPN Wakatobi						
	9	9	KSPN Morotai						
	10	10	KSPN Raja Ampat						
9 Kawasan Industri (di luar Jawa)	11	1	KI Sei Mangkei						
	12	2	KI Galang Batang						
	13	3	KI Bintan Aerospace						
	14	4	KI Sadai						
	15	5	KI Ketapang						
	16	6	KI Surya Borneo						
	17	7	KI Palu	7. Terminal Mambo, Kota Palu		1			1
	18	8	KI Teluk Weda						
	19	9	KI Teluk Bintuni						

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Maret 2023

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL	FASILITAS PRASARANA TRANSPORTASI JALAN						
	Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)	
8 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	20	1	KPBPB Sabang				
	21	2	KEK Arun Lhokseumawe	8. Terminal Paya Ilang, Kota Lhokseumawe		1	
	22	3	KPBPB Batam Bintang Karimun				
	23	4	KEK Tanjung Lesung	9. Terminal Labuan, Kab. Pandeglang		1	
	24	5	KEK Mandalika*				
	25	6	KEK MBTK	10. Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda	1. TBI Entikong - Prov. Kalbar	1	
	26	7	KEK Bitung	11. Terminal Tangkoko, Kota Bitung		1	
	27	8	KEK Morotai				
	28	1	Banda Aceh	12. Terminal Batoh, Kota Banda Aceh		1	
	29	2	Mebidangrov (Medan dsk)	13. Terminal Amplas, Kota Medan 14. Terminal Pinang Baris, Kota Medan		1	
	30	3	Padang dsk	15. Terminal Anak Air, Kota Padang		1	
	31	4	Pekanbaru	16. Terminal Bandaraya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru		1	Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)
32	5	Dumai	17. Terminal Dumai, Kota Dumai		1		
33	6	Batam					
34	7	Jambi	18. Terminal Alam Barajo, Kota Jambi		1		
35	8	Pelembang dsk	19. Terminal Alang-alang Lebar, Kota Palembang, 20. Terminal Karya Jaya, Kota Palembang		1	Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang (TA. 2020)	
36	9	Bengkulu	21. Terminal Air Sebakul		1		
37	10	Pangkal Pinang					
38	11	Bandar Lampung	22. Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung		1		
39	12	Jabodetabek	23. Terminal Kampung Rambutan, Kota Jakarta Timur 24. Terminal Kalideres, Kota Jakarta Barat 25. Terminal Baranangsiang, Kota Bogor 26. Terminal Jatijajar, Kota Depok 27. Terminal Induk Bekasi, Kota Bekasi 28. Terminal Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan 29. Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang		1		
40	13	Serang	30. Terminal Pakupatan, Kota Serang		1		

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Maret 2023

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS						
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN						
			Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)	
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	41	14	Cilegon	31. Terminal Merak, Kab. Cilegon		1		1	
	42	15	Bandung Raya	32. Terminal Cicaheum, Kota Bandung 33. Terminal Leuwi Panjang, Kota Bandung		1		1	
	43	16	Cirebon	34. Terminal Harjamukti, Kota Cirebon		1		1	
	44	17	Surakarta	35. Terminal Tirtonadi, Kota Solo		1	Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)	1	
	45	18	Kedungsepur (Semarang dsk)	36. Terminal Mangkang, Kota Semarang 37. Terminal Bawen, Kab. Semarang 38. Terminal Tingkir, Kota Salatiga		1		1	
	46	19	Cilacap	39. Terminal Bangga Mbangun Desa		1		1	
	47	20	Yogyakarta	40. Terminal Giwangan		1		1	
	48	21	Gerbangkertosusilo (Surabaya dsk)	41. Terminal Osowilangun, Kota Surabaya 42. Terminal Purabaya, Kab. Sidoarjo		1		1	
	49	22	Malang	43. Terminal Arjosari, Kota Malang		1		1	
	50	23	Sarbagita	44. Terminal Mengwi, Kab. Badung		1	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Perkotaan Skema Buy The Service di Denpasar (dukungan G20 TA. 2022)	1	
	51	24	Mataram Raya	Terminal Mandalika - Kota Mataram		1		1	
	52	25	Kupang	45. Terminal Bimoku	2. TBI Motamasin - Prov. NTT, 3. TBI Wini - Prov. NTT		1		1
	53	26	Pontianak						
	54	27	Palangkaraya	46. Terminal W.A Gara		1		1	
	55	28	Banjarmasin dsk						
	56	29	Balikpapan-Samarinda-Bontang	47. Terminal Batu Ampar, Kota Balikpapan 48. Terminal Samarinda Seberang, Kota Samarinda		1		1	
	57	30	Tarakan						
	58	31	Gorontalo	49. Terminal Isimu, Kab. Gorontalo 50. Terminal Duinggi, Kota Gorontalo		1		1	
	59	32	Manado	Terminal Liwas		1		1	
	60	33	Bitung	Terminal Tangkoko		1		1	
61	34	Palu	Terminal Mamboro		1		1		
62	35	Mammasata (Makassar dsk)	51. Terminal Daya, Kota Makassar		1		1		
63	36	Kendari	52. Terminal Puuwatu, Kota Kendari		1		1		
64	37	Ambon							
65	38	Temate							

IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan Januari 2023

KAWASAN STRATEGIS NASIONAL			FASILITAS					
			PRASARANA TRANSPORTASI JALAN					
			Terminal Tipe-A	Terminal Barang	Jumlah KSN yang terlayani Terminal	Fasilitas Pendukung & Integrasi Moda	Jumlah KSN yang terlayani FASPIM	Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan Terminal & Faspim)
66	39	Sorong						
67	40	Timika						
68	41	Jayapura	53. Terminal Entrop, Kota Jayapura		1			1
69	42	Merauke						
					41		8	43

*untuk lokasi yang tidak ada nomor = 1 terminal melayani 2 kawasan

$$\text{Realisasi (Rasio)} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional s.d tahun(n)(10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan}}{\text{Jumlah Kawasan Strategis Nasional (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN) yang ditetapkan}}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \quad \text{Capaian Rasio Konektivitas} = \frac{43 \text{ wilayah (irisan simpul TTA \& faspim yang terlayani)}}{69 \text{ wilayah KSN}} = 0,62$$

$$\% \text{ Capaian} = \frac{0,62}{0,62} \times 100\% = 100,00\%$$

Jumlah Kawasan yang terlayani Terminal	Jumlah KSN yg terlayani Terminal Tipe A / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	41
Rasio Kawasan yang terlayani terminal		0,59
Jumlah Kawasan yang terlayani Faspim	Jumlah KSN yg terlayani Faspim / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	8
Rasio Kawasan yang terlayani Faspim		0,12
Jumlah Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan)	Jumlah KSN terlayani Simpul Prasarana Transportasi Jalan / Jumlah KSN (10 DPP, 9 KI, 8 KEK, 42 PKN = 69 Wilayah)	43
Rasio Kawasan yang terlayani PTJ (Irisan)		0,62

Lampiran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2
Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
IKK 2 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	lokasi	104	105
Terminal Penumpang Tipe A kewenangan Ditjen Hubdat			
- Terminal Langsa		1	1
- Terminal Lhokseumawe		1	1
- Terminal Meulaboh		1	1
- Terminal Batoh		1	1
- Terminal Paya Ilang		1	1
- Terminal Tanjung Pinggir		1	1
- Terminal Madya Tarutung		1	1
- Terminal Sibolga		1	1
- Terminal Padang Bulan		0	0
- Terminal Amplas		1	1
- Terminal Pinang Baris		1	1
- Terminal Anak Air		1	1
- Terminal Kiliran Jao		1	1
- Terminal Barih Solok		1	1
- Terminal Simpang Aur		1	1
- Terminal Jati Pariaman		1	1
- Terminal Bangkinang		1	1
- Terminal Payung Sekaki		1	1
- Terminal Dumai		1	1
- Terminal Gerbangsari		0	0
- Terminal Alam Barajo		1	1
- Terminal Muara Bungo		1	1
- Terminal Pulau Tujuh Bangko		1	1
- Terminal Sribulan		1	1
- Terminal Alang-Alang Lebar		1	1
- Terminal Kayuagung		1	1
- Terminal Batu Kuning		1	1
- Terminal Betung		1	1
- Terminal Karya Jaya		1	1
- Terminal Simpang Periuk		1	1
- Terminal Batay		1	1
- Terminal Simpang Nangka		1	1
- Terminal Air Sebakul		0	0
- Terminal Rajabasa		1	1
- Terminal Betan Subing		0	0
- Terminal Pakupatan		1	1
- Terminal Labuan		1	1
- Terminal Mandala Lebak		1	1
- Terminal Merak		1	1
- Terminal KH. Ahmad Sanusi		1	1
- Terminal Ciakar		1	1
- Terminal Guntur Melati Garut		1	1
- Terminal Harjamukti		1	1
- Terminal Indihiang		1	1
- Terminal Kertawangunan		1	1
- Terminal Subang		1	1
- Terminal Banjar		1	1
- Terminal Cikampek		1	1
- Terminal Cicaheum		0	0
- Terminal Leuwipanjang		1	1
- Terminal Purworejo		1	1
- Terminal Cepu		1	1
- Terminal Bangsa Mbangun Desa		1	1
- Terminal Giri Adipura		1	1
- Terminal Ir. Soekarno		1	1
- Terminal Kebumen		1	1
- Terminal Mangkang		1	1
- Terminal Pekalongan		1	1
- Terminal Induk Pematang		1	1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
- Terminal Bulupitu Purwokerto		1	1
- Terminal Mendolo		1	1
- Terminal Bawen		1	1
- Terminal Tidar		1	1
- Terminal Tingkir		1	1
- Terminal Tirtonadi		1	1
- Terminal Jati		1	1
- Terminal Bobot Sari		1	1
- Terminal Demak		0	0
- Terminal Tegal		1	1
- Terminal Jepara		1	0
- Terminal Giwangan		1	1
- Terminal Dhaksinarqa		1	1
- Terminal Arjosari		1	1
- Terminal Arya Wiraraja		1	1
- Terminal Bangkalan		0	0
- Terminal Banyuwangga		1	1
- Terminal Gayatri		1	1
- Terminal Kertonegoro		1	1
- Terminal Pacitan		1	1
- Terminal Patria		1	1
- Terminal Purboyo		1	1
- Terminal Selo Aji		1	1
- Terminal Tamanan		1	1
- Terminal Tawangalun		1	1
- Terminal Surodakan		1	1
- Terminal Rajekwesi		1	1
- Terminal Pandaan Pasuruan		1	1
- Terminal Kambang Putih		1	1
- Terminal Sri Tanjung		0	0
- Terminal Osowilangun		0	0
- Terminal Purabaya		0	0
- Terminal Purabaya		0	1
- Terminal Mengwi		1	1
- Terminal Mandalika		1	1
- Terminal Sumer Payung		1	1
- Terminal Dara		1	1
- Terminal Kefamenanu		0	1
- Terminal Bimoku		0	0
- Terminal Sei Ambawang		1	1
- Terminal Singkawang		0	0
- Terminal W.A. Gara		1	1
- Terminal Gambut Barakat		1	1
- Terminal Batu Ampar		1	1
- Terminal Samarinda Seberang		1	1
- Terminal Induk Lumpue		1	1
- Terminal Latenri Sessu Pekkae		1	1
- Terminal Petta Pongawai		1	1
- Terminal Daya		0	0
- Terminal Songka Palopo		0	0
- Terminal Simbuang		1	1
- Terminal Tipalayo		1	1
- Terminal Kasintuwu		1	1
- Terminal Mamboro		1	1
- Terminal Boroko		1	1
- Terminal Liwas		0	0
- Terminal Tangkoko		1	1
- Terminal Bolaang Monqondow		0	0
- Terminal Puuwatu		1	1
- Terminal Isimu		1	1
- Terminal Duingqi		1	1
- Terminal Entrop		1	1
Terminal Barang			
- Terminal Entikong		1	1
- Terminal Aruk		0	0

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
- Terminal Nanga Badau		0	0
- Terminal Motaain		0	0
- Terminal Motamasin		0	0
- Terminal Wini		0	0
- Terminal Skow		0	0

IKK Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Periode
Maret 2023

Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Strategis Nasional dengan target penyediaan fasilitas pendukung sampai dengan tahun 2023 ada sebanyak 12 lokasi. Penyediaan fasilitas pendukung sudah terealisasi di 12 (dua belas) lokasi, antara lain:

1. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Magelang (TA. 2020)
2. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Purworejo (TA. 2020)
3. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Klaten (TA. 2020)
4. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Salatiga (TA. 2020)
5. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Surakarta (TA. 2020)
6. Pembangunan Fasilitas Pendukung Lajur Sepeda di Palembang (TA. 2020)
7. Pembangunan Fasilitas Pendukung di Kota Pekanbaru (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021)
8. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika (dilaksanakan oleh BPTD Tahun 2021 dan 2022 untuk mendukung penyelenggaraan Moto GP Tahun 2022)
9. Pembangunan Fasilitas Pendukung di KSPN Danau Toba (TA. 2022)
10. Pembangunan Fasilitas Pendukung di KSPN Borobudur (TA. 2022)
11. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Lab Bajo (TA. 2022)
12. Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Angkutan Perkotaan Skema Buy The Service di Denpasar (dukungan G20 TA. 2022)

Hasil Per Komponen

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
403845	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi	Jambi	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
403845	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi	Jambi	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.52	3.78	94.38	Sangat Baik	A
403854263	Terminal Tipe A Sei Ambawang	Kalimantan Barat	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.20	3.70	92.58	Sangat Baik	A
403854263	Terminal Tipe A Sei Ambawang	Kalimantan Barat	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.41	3.75	93.78	Sangat Baik	A
40385118	UPPKB Rejoso	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.19	3.70	92.50	Sangat Baik	A
40385118	UPPKB Rejoso	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
4038512	Terminal Tipe A Selo Aji	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.48	3.77	94.18	Sangat Baik	A
4038512	Terminal Tipe A Selo Aji	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.55	3.78	94.60	Sangat Baik	A
40385119	UPPKB Sedarum	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.84	3.85	96.25	Sangat Baik	A
40385119	UPPKB Sedarum	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
40385120	UPPKB Widodaren	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.19	3.70	92.50	Sangat Baik	A
40385120	UPPKB Widodaren	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
403847235	Pelabuhan Penyeberangan Perintis Sadai	Kepulauan Bangka Belitung	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	14.09	3.22	80.50	Baik	B
403847235	Pelabuhan Penyeberangan Perintis Sadai	Kepulauan Bangka Belitung	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	14.88	3.40	85	Baik	B
4038463	UPPKB Way Urang	Lampung	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	13.83	3.16	79	Baik	B
4038463	UPPKB Way Urang	Lampung	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.53	3.55	88.75	Baik	B
4038514	Terminal Tipe A Pacitan	Jawa Timur	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.62	3.57	89.25	Baik	B

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
4038514	Terminal Tipe A Pacitan	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.67	3.58	89.53	Baik	B
403842248	Pelabuhan Penyeberanga Perintis Sibolga	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.19	3.70	92.50	Sangat Baik	A
403842248	Pelabuhan Penyeberanga Perintis Sibolga	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.52	3.78	94.38	Sangat Baik	A
403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	14.88	3.40	85	Baik	B
403855	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	14.88	3.40	85	Baik	B
4038523	UPPKB Cekik	Bali	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A
4038523	UPPKB Cekik	Bali	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
4038518	Terminal Tipe A Surodakan	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A
4038518	Terminal Tipe A Surodakan	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
4038652269	UPPKB Passo	Maluku	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.27	3.72	92.97	Sangat Baik	A
4038652269	UPPKB Passo	Maluku	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.93	3.64	91	Sangat Baik	A
1718005	BPTD Wil.XI JATIM	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
1718005	BPTD Wil.XI JATIM	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A
40385210	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Lembar	Nusa Tenggara Barat	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.19	3.93	98.20	Sangat Baik	A
40385210	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Lembar	Nusa Tenggara Barat	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.17	3.93	98.13	Sangat Baik	A
40385131	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Ujung	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.13	3.91	97.86	Sangat Baik	A

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
40385131	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Ujung	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.05	3.90	97.43	Sangat Baik	A
403842238	Terminal Tipe A Tanjung Pinggir	Sumatera Utara	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.17	3.47	86.70	Baik	B
403842238	Terminal Tipe A Tanjung Pinggir	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.12	3.46	86.39	Baik	B
403854265	UPPKB Sosok	Kalimantan Barat	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
403854265	UPPKB Sosok	Kalimantan Barat	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.17	3.93	98.13	Sangat Baik	A
40385125	UPPKB Watudodol	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.89	3.86	96.50	Sangat Baik	A
40385125	UPPKB Watudodol	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.01	3.89	97.19	Sangat Baik	A
4038462	Terminal Tipe A Rajabasa	Lampung	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	14.88	3.40	85	Baik	B
4038462	Terminal Tipe A Rajabasa	Lampung	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	14.88	3.40	85	Baik	B
40385114	Terminal Tipe A Arjosari	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.80	3.84	96	Sangat Baik	A
40385114	Terminal Tipe A Arjosari	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.79	3.84	95.94	Sangat Baik	A
4038501	Terminal Tipe A Giri Adipura	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.12	3.91	97.83	Sangat Baik	A
4038501	Terminal Tipe A Giri Adipura	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.11	3.91	97.79	Sangat Baik	A
403861191	UPPKB Mayoa	Sulawesi Tengah	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	14.88	3.40	85	Baik	B
403861191	UPPKB Mayoa	Sulawesi Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	14.88	3.40	85	Baik	B
40385123	UPPKB Baureno	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	14.93	3.41	85.31	Baik	B
40385123	UPPKB Baureno	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.36	3.74	93.50	Sangat Baik	A
40385127	UPPKB Trowulan	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.14	3.69	92.20	Sangat Baik	A
40385127	UPPKB Trowulan	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.68	3.81	95.31	Sangat Baik	A

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
403854267	UPPKB Satong	Kalimantan Barat	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
403854267	UPPKB Satong	Kalimantan Barat	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A
4038522	Terminal Tipe A Mengwi	Bali	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.93	3.87	96.73	Sangat Baik	A
4038522	Terminal Tipe A Mengwi	Bali	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.96	3.88	96.93	Sangat Baik	A
40385132	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Ketapang	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.91	3.86	96.60	Sangat Baik	A
40385132	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Ketapang	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.07	3.90	97.56	Sangat Baik	A
4038571	Terminal Tipe A W.A Gara	Kalimantan Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.78	3.84	95.91	Sangat Baik	A
4038571	Terminal Tipe A W.A Gara	Kalimantan Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.71	3.82	95.48	Sangat Baik	A
403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	12.25	2.80	70	Kurang Baik	C
403852	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XII Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bali	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	12.25	2.80	70	Kurang Baik	C
4038526	Terminal Tipe A Sumer Payung	Nusa Tenggara Barat	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	13.56	3.10	77.50	Baik	B
4038526	Terminal Tipe A Sumer Payung	Nusa Tenggara Barat	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	13.04	2.98	74.50	Kurang Baik	C
40385110	Terminal Tipe A Bayuangga	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.63	3.80	95.04	Sangat Baik	A
40385110	Terminal Tipe A Bayuangga	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.41	3.75	93.79	Sangat Baik	A
403842241	UPPKB Sibolangit	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.52	3.78	94.38	Sangat Baik	A
403842241	UPPKB Sibolangit	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.84	3.85	96.25	Sangat Baik	A

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
4038515	Terminal Tipe A Tamanan	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
4038515	Terminal Tipe A Tamanan	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.12	3.91	97.81	Sangat Baik	A
403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.19	3.70	92.50	Sangat Baik	A
403857	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.19	3.70	92.50	Sangat Baik	A
4038631	Terminal Tipe A Isimu	Gorontalo	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.01	3.89	97.19	Sangat Baik	A
4038631	Terminal Tipe A Isimu	Gorontalo	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.11	3.91	97.75	Sangat Baik	A
403842243	UPPKB Mambang Muda	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.23	3.94	98.45	Sangat Baik	A
403842243	UPPKB Mambang Muda	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.36	3.97	99.22	Sangat Baik	A
40385025	UPPKB Tanjung	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.76	3.83	95.75	Sangat Baik	A
40385025	UPPKB Tanjung	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.04	3.89	97.34	Sangat Baik	A
40385022	UPPKB Sarang	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.35	3.96	99.12	Sangat Baik	A
40385022	UPPKB Sarang	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.11	3.91	97.79	Sangat Baik	A
4038503	Terminal Tipe A Mangkang	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.83	3.85	96.19	Sangat Baik	A
4038503	Terminal Tipe A Mangkang	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.70	3.82	95.45	Sangat Baik	A
40385031	UPPKB Taman Martani	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.64	3.80	95.08	Sangat Baik	A
40385031	UPPKB Taman Martani	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.84	3.85	96.25	Sangat Baik	A
4038521	Terminal Tipe A Mandalika	Nusa Tenggara Barat	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.66	3.58	89.50	Baik	B

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
4038521	Terminal Tipe A Mandalika	Nusa Tenggara Barat	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.31	3.50	87.50	Baik	B
4038506	Terminal Tipe A Bawen	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.20	3.70	92.56	Sangat Baik	A
4038506	Terminal Tipe A Bawen	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.25	3.72	92.88	Sangat Baik	A
403853151	Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kalabahi	Nusa Tenggara Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.54	3.78	94.51	Sangat Baik	A
403853151	Pelabuhan Penyeberangan Perintis Kalabahi	Nusa Tenggara Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.35	3.74	93.41	Sangat Baik	A
403843	BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat - TTA Anak Air	Sumatera Barat	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A
403843	BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat - TTA Anak Air	Sumatera Barat	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.98	3.88	97	Sangat Baik	A
403847223	Terminal Tipe A Kayuagung	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.84	3.85	96.25	Sangat Baik	A
403847223	Terminal Tipe A Kayuagung	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.63	3.80	95	Sangat Baik	A
40385117	UPPKB Widang	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.03	3.67	91.63	Sangat Baik	A
40385117	UPPKB Widang	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.03	3.66	91.60	Sangat Baik	A
40385113	Terminal Tipe A Pandaan Kab. Pasuruan	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.56	3.79	94.63	Sangat Baik	A
40385113	Terminal Tipe A Pandaan Kab. Pasuruan	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.64	3.80	95.07	Sangat Baik	A
40385023	UPPKB Klepu	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.53	3.78	94.44	Sangat Baik	A
40385023	UPPKB Klepu	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.45	3.76	94	Sangat Baik	A
352596	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	DKI Jakarta	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.93	3.64	91	Sangat Baik	A
352596	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	DKI Jakarta	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.48	3.54	88.48	Baik	B

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
40385029	UPPKB Kulwaru	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.19	3.70	92.50	Sangat Baik	A
40385029	UPPKB Kulwaru	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.33	3.73	93.32	Sangat Baik	A
4038513	Terminal Tipe A Gayatri	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.27	3.95	98.66	Sangat Baik	A
4038513	Terminal Tipe A Gayatri	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.20	3.93	98.29	Sangat Baik	A
403847234	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Muntok	Kepulauan Bangka Belitung	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.49	3.54	88.50	Baik	B
403847234	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Muntok	Kepulauan Bangka Belitung	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.64	3.58	89.38	Baik	B
40385026	UPPKB Banyudono	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.41	3.98	99.48	Sangat Baik	A
40385026	UPPKB Banyudono	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.42	3.98	99.53	Sangat Baik	A
40385121	UPPKB Kalibaru Manis	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.47	3.99	99.84	Sangat Baik	A
40385121	UPPKB Kalibaru Manis	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.48	3.99	99.87	Sangat Baik	A
4038508	Terminal Tipe A Pekalongan	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.20	3.70	92.58	Sangat Baik	A
4038508	Terminal Tipe A Pekalongan	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16	3.66	91.45	Sangat Baik	A
4038635	Pelabuhan Penyeberangan Perintis Gorontalo	Gorontalo	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.02	3.89	97.27	Sangat Baik	A
4038635	Pelabuhan Penyeberangan Perintis Gorontalo	Gorontalo	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.96	3.88	96.92	Sangat Baik	A
40385016	Terminal Tipe A Bangga Bangun Desa	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.46	3.76	94.04	Sangat Baik	A
40385016	Terminal Tipe A Bangga Bangun Desa	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.53	3.55	88.74	Baik	B
40385010	Terminal Tipe A Bobot Sari	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17	3.88	97.12	Sangat Baik	A

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
40385010	Terminal Tipe A Bobot Sari	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.87	3.86	96.39	Sangat Baik	A
40385129	UPPKB Trosobo	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.13	3.69	92.16	Sangat Baik	A
40385129	UPPKB Trosobo	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.19	3.70	92.50	Sangat Baik	A
40385028	Terminal Tipe A Dhaksinarga	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.80	3.84	96.01	Sangat Baik	A
40385028	Terminal Tipe A Dhaksinarga	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.86	3.85	96.35	Sangat Baik	A
40385116	Terminal Tipe A kembang Putih	Jawa Timur	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	14.88	3.40	85	Baik	B
40385116	Terminal Tipe A kembang Putih	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	14.88	3.40	85	Baik	B
40385018	Terminal Tipe A Purworejo	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.51	3.77	94.32	Sangat Baik	A
40385018	Terminal Tipe A Purworejo	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.37	3.74	93.55	Sangat Baik	A
4038633	UPPKB Molotabu	Gorontalo	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A
4038633	UPPKB Molotabu	Gorontalo	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
403842239	Terminal Tipe A Madya Tarutung	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.03	3.44	85.91	Baik	B
403842239	Terminal Tipe A Madya Tarutung	Sumatera Utara	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.21	3.48	86.89	Baik	B
403848	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten	Banten	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.98	3.88	97	Sangat Baik	A
403848	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII Provinsi Banten	Banten	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.61	3.80	94.89	Sangat Baik	A
40385111	Terminal Tipe A Tawang Alun	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.65	3.81	95.16	Sangat Baik	A
40385111	Terminal Tipe A Tawang Alun	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.42	3.75	93.83	Sangat Baik	A
40385112	Terminal Tipe A Arya Wiraraja	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
40385112	Terminal Tipe A Arya Wiraraja	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.48	4	99.90	Sangat Baik	A
40385021	UPPKB Subah	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.16	3.69	92.33	Sangat Baik	A
40385021	UPPKB Subah	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.19	3.70	92.50	Sangat Baik	A
40385030	UPPKB Kalitirto	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.02	3.89	97.26	Sangat Baik	A
40385030	UPPKB Kalitirto	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.02	3.89	97.23	Sangat Baik	A
403842242	UPPKB Dolok Estate 50	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.50	4	100	Sangat Baik	A
403842242	UPPKB Dolok Estate 50	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.94	3.64	91.09	Sangat Baik	A
403847232	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Tanjung Api-Api	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	14.34	3.28	81.97	Baik	B
403847232	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Tanjung Api-Api	Sumatera Selatan	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	14.27	3.26	81.54	Baik	B
4038484	Terminal Tipe A Pakupatan	Banten	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.07	3.90	97.56	Sangat Baik	A
4038484	Terminal Tipe A Pakupatan	Banten	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.06	3.90	97.49	Sangat Baik	A
4038552	UPPKB Kintap	Kalimantan Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.50	3.77	94.29	Sangat Baik	A
4038552	UPPKB Kintap	Kalimantan Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.88	3.86	96.48	Sangat Baik	A
403861188	Terminal Tipe A Kasintuwu	Sulawesi Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.28	3.72	93	Sangat Baik	A
403861188	Terminal Tipe A Kasintuwu	Sulawesi Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.24	3.71	92.81	Sangat Baik	A
1718004	Terminal Tirtonadi - Solo	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.98	3.88	97.06	Sangat Baik	A
1718004	Terminal Tirtonadi - Solo	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.88	3.86	96.48	Sangat Baik	A
40385017	Terminal Tipe A Purwokerto	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.91	3.64	90.92	Sangat Baik	A

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
40385017	Terminal Tipe A Purwokerto	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.97	3.65	91.23	Sangat Baik	A
403864204	Terminal Tipe A Tangkoko	Sulawesi Utara	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.41	3.98	99.50	Sangat Baik	A
403864204	Terminal Tipe A Tangkoko	Sulawesi Utara	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.42	3.98	99.52	Sangat Baik	A
403854262	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.19	3.70	92.50	Sangat Baik	A
403854262	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.19	3.70	92.50	Sangat Baik	A
40385019	Terminal Tipe A Tegal	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.67	3.58	89.56	Baik	B
40385019	Terminal Tipe A Tegal	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.21	3.71	92.63	Sangat Baik	A
40385130	UPPKB Pojok	Jawa Timur	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.75	3.60	90	Sangat Baik	A
40385130	UPPKB Pojok	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.75	3.60	90	Sangat Baik	A
403854264	UPPKB Siantan	Kalimantan Barat	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.52	3.78	94.38	Sangat Baik	A
403854264	UPPKB Siantan	Kalimantan Barat	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.45	3.76	94	Sangat Baik	A
40385024	UPPKB Ajibarang	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.87	3.86	96.39	Sangat Baik	A
40385024	UPPKB Ajibarang	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.92	3.87	96.67	Sangat Baik	A
40385015	Terminal Tipe A Tingkir	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.75	3.83	95.70	Sangat Baik	A
40385015	Terminal Tipe A Tingkir	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.84	3.85	96.23	Sangat Baik	A
403847221	Terminal Tipe A Karya Jaya	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.63	3.80	95.05	Sangat Baik	A
403847221	Terminal Tipe A Karya Jaya	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.47	3.76	94.09	Sangat Baik	A
4038509	Terminal Tipe A Kebumen	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.40	3.75	93.73	Sangat Baik	A

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
4038509	Terminal Tipe A Kebumen	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.47	3.77	94.13	Sangat Baik	A
403842240	Terminal Tipe A Sibolga	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.08	3.90	97.60	Sangat Baik	A
403842240	Terminal Tipe A Sibolga	Sumatera Utara	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.52	3.78	94.38	Sangat Baik	A
4038551	Terminal Tipe A Gambut Barakat	Kalimantan Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.99	3.88	97.07	Sangat Baik	A
4038551	Terminal Tipe A Gambut Barakat	Kalimantan Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.24	3.94	98.50	Sangat Baik	A
403847222	Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.28	3.72	93.01	Sangat Baik	A
403847222	Terminal Tipe A Alang-Alang Lebar	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.59	3.79	94.82	Sangat Baik	A
40385011	Terminal Tipe A Mendolo	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.49	3.77	94.24	Sangat Baik	A
40385011	Terminal Tipe A Mendolo	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.66	3.81	95.17	Sangat Baik	A
025734	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	Jawa Barat	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.63	3.80	95	Sangat Baik	A
025734	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	Jawa Barat	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.92	3.64	90.97	Sangat Baik	A
40385115	Terminal Tipe A Patria	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.17	3.92	98.09	Sangat Baik	A
40385115	Terminal Tipe A Patria	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.21	3.93	98.35	Sangat Baik	A
4038553	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Batulicin	Kalimantan Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.98	3.88	97	Sangat Baik	A
4038553	Pelabuhan Penyeberangan Komersial Batulicin	Kalimantan Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.50	4	100	Sangat Baik	A
4038519	Terminal Tipe A Rajekwesi	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.59	3.56	89.11	Baik	B
4038519	Terminal Tipe A Rajekwesi	Jawa Timur	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.70	3.59	89.74	Baik	B

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
403847227	Terminal Tipe A Simpang Periuk	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.09	3.91	97.66	Sangat Baik	A
403847227	Terminal Tipe A Simpang Periuk	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.15	3.92	98	Sangat Baik	A
4038502	Terminal Tipe A Tidar	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.55	3.78	94.56	Sangat Baik	A
4038502	Terminal Tipe A Tidar	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.67	3.81	95.25	Sangat Baik	A
1718003	Terminal Ir.Soekarno - Klaten	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.98	3.88	97.01	Sangat Baik	A
1718003	Terminal Ir.Soekarno - Klaten	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.12	3.91	97.81	Sangat Baik	A
403847225	Terminal Tipe A Betung	Sumatera Selatan	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	14.44	3.30	82.50	Baik	B
403847225	Terminal Tipe A Betung	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	14.66	3.35	83.75	Baik	B
403847233	Pelabuhan Sungai Danau 35 Ilir	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.38	3.97	99.33	Sangat Baik	A
403847233	Pelabuhan Sungai Danau 35 Ilir	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.39	3.97	99.36	Sangat Baik	A
412735	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT	DKI Jakarta	WBK	Tidak Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.23	3.48	87	Baik	B
412735	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN DARAT	DKI Jakarta	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	14.85	3.40	84.88	Baik	B
4038496	Terminal Tipe A Guntur Melati	Jawa Barat	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.36	3.97	99.21	Sangat Baik	A
4038496	Terminal Tipe A Guntur Melati	Jawa Barat	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.40	3.98	99.42	Sangat Baik	A
403847226	Terminal Tipe A Lahat	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.42	3.53	88.13	Baik	B
403847226	Terminal Tipe A Lahat	Sumatera Selatan	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.93	3.64	91	Sangat Baik	A
4038483	Terminal Tipe A Lebak	Banten	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	15.93	3.64	91	Sangat Baik	A

Kode Unit/ Satker	Unit/ Satuan Kerja	Provinsi	Usulan	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
4038483	Terminal Tipe A Lebak	Banten	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	15.45	3.53	88.28	Baik	B
4038505	Terminal Tipe A Cepu	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.63	3.80	95.03	Sangat Baik	A
4038505	Terminal Tipe A Cepu	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.81	3.84	96.04	Sangat Baik	A
40385027	Terminal Tipe A Giwangan	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.48	3.77	94.18	Sangat Baik	A
40385027	Terminal Tipe A Giwangan	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.42	3.75	93.81	Sangat Baik	A
4038507	Terminal Tipe A Induk Pemalang	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.64	3.80	95.06	Sangat Baik	A
4038507	Terminal Tipe A Induk Pemalang	Jawa Tengah	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.47	3.77	94.13	Sangat Baik	A
4038482	Terminal Tipe A Labuan	Banten	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	17.15	3.92	97.98	Sangat Baik	A
4038482	Terminal Tipe A Labuan	Banten	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	17.03	3.89	97.32	Sangat Baik	A
40385126	UPPKB Singosari	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.63	3.80	95	Sangat Baik	A
40385126	UPPKB Singosari	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.52	3.78	94.38	Sangat Baik	A
4038517	Terminal Tipe A Purboyo	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	III. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	16.54	3.78	94.50	Sangat Baik	A
4038517	Terminal Tipe A Purboyo	Jawa Timur	WBK	Memenuhi Syarat	II. KUALITAS PELAYANAN	IKM	16.71	3.82	95.47	Sangat Baik	A

**Lampiran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2
Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A**

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI
IKK 2	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	55,72	59,02
	- Terminal Langsa	%	71	65
	- Terminal Lhokseumawe	%	25	51
	- Terminal Meulaboh	%	46	40
	- Terminal Batoh	%	43	50
	- Terminal Paya Ilang	%	34	62
	- Terminal Tanjung Pinggir	%	41	91
	- Terminal Madya Tarutung	%	31	55
	- Terminal Sibolga	%	17	4
	- Terminal Padang Bulan	%		
	- Terminal Amplas	%	48	76
	- Terminal Pinang Baris	%	21	61
	- Terminal Anak Air	%	45	43
	- Terminal Kiliran Jao	%	33	24
	- Terminal Barih Solok	%	37	28
	- Terminal Simpang Aur	%	33	25
	- Terminal Jati Pariaman	%	43	62
	- Terminal Bangkinang	%	59	66
	- Terminal Payung Sekaki	%	40	52
	- Terminal Dumai	%	70	39
	- Terminal Gerbangsari	%		
	- Terminal Alam Barajo	%	21	49
	- Terminal Muara Bungo	%	60	37
	- Terminal Pulau Tujuh Bangko	%	43	43
	- Terminal Sribulan	%	57	39
	- Terminal Alang-Alang Lebar	%	57	69
	- Terminal Kayuagung	%	35	51
	- Terminal Batu Kuning	%	50	23
	- Terminal Betung	%		48
	- Terminal Karya Jaya	%	71	40
	- Terminal Simpang Periuk	%	26	53
	- Terminal Batay	%	12	15
	- Terminal Simpang Nangka	%	40	53
	- Terminal Air Sebakul	%		
	- Terminal Rajabasa	%	41	65
	- Terminal Betan Subing	%		
	- Terminal Pakupatan	%	57	48
	- Terminal Labuan	%	29	53
	- Terminal Mandala Lebak	%	83	90
	- Terminal Merak	%	72	63
	- Terminal KH. Ahmad Sanusi	%	61	54
	- Terminal Ciakar	%	49	59
	- Terminal Guntur Melati Garut	%	90	66
	- Terminal Harjamukti	%	75	66
	- Terminal Indihiang	%	56	76
	- Terminal Kertawangunan	%	59	67
	- Terminal Subang	%	96	94
	- Terminal Banjar	%	91	98
	- Terminal Cikampek	%	60	19
	- Terminal Leuwipanjang	%	46	83
	- Terminal Purworejo	%	50	98
	- Terminal Cepu	%	46	72
	- Terminal Bangga Mbanqun Desa	%	46	58
	- Terminal Giri Adipura	%	75	72
	- Terminal Ir. Soekarno	%	67	69
	- Terminal Kebumen	%	41	92
	- Terminal Mangkang	%	60	61
	- Terminal Pekalongan	%	78	59
	- Terminal Induk Pernalang	%	45	75
	- Terminal Bulupitu Purwokerto	%	80	76
	- Terminal Mendolo	%	66	34
	- Terminal Bawen	%	51	51
	- Terminal Tidar	%	83	59
	- Terminal Tingkir	%	26	66
	- Terminal Tirtonadi	%	100	98

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
- Terminal Jati	%	76	60
- Terminal Bobot Sari	%	77	28
- Terminal Demak	%		
- Terminal Tegal	%	52	62
- Terminal Giwangan	%	63	73
- Terminal Dhaksinarga	%	58	55
- Terminal Arjosari	%	86	84
- Terminal Arya Wiraraja	%	49	54
- Terminal Bangkalan	%		
- Terminal Banyuwangga	%	73	71
- Terminal Gayatri	%	66	66
- Terminal Kertonegoro	%	50	57
- Terminal Pacitan	%	47	77
- Terminal Patria	%	51	85
- Terminal Purboyo	%	54	60
- Terminal Selo Aji	%	82	95
- Terminal Tamanan	%	52	36
- Terminal Tawangalun	%	82	75
- Terminal Surodakan	%	54	90
- Terminal Rajekwesi	%	87	76
- Terminal Pandaan Pasuruan	%	78	94
- Terminal Kambang Putih	%	55	45
- Terminal Sri Tanjung	%		
- Terminal Purabaya	%		47
- Terminal Mengwi	%	61	67
- Terminal Mandalika	%	61	59
- Terminal Sumer Payung	%	70	54
- Terminal Dara	%	45	44
- Terminal Kefamenanu	%		
- Terminal Bimoku	%		
- Terminal Sei Ambawang	%	78	72
- Terminal Singkawang	%		
- Terminal W.A. Gara	%	54	89
- Terminal Gambut Barakat	%	76	64
- Terminal Batu Ampar	%	37	62
- Terminal Samarinda Seberang	%	41	77
- Terminal Induk Lumpue	%	38	67
- Terminal Latenri Sessu Pekkae	%	32	35
- Terminal Petta Pongawai	%	73	54
- Terminal Daya	%		
- Terminal Songka Palopo	%		
- Terminal Simbuang	%	54	53
- Terminal Tupalayo	%	63	50
- Terminal Kasintuwu	%	23	38
- Terminal Mamboro	%	37	50
- Terminal Boroko	%	36	54
- Terminal Liwas	%		20
- Terminal Tangkoko	%	25	44
- Terminal Bolaang Mongondow	%		
- Terminal Puuwatu	%	85	98
- Terminal Isimu	%	82	56
- Terminal Duingingi	%	87	41
- Terminal Entrop	%	90	45

Lampiran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3
Persentase penerapan SMART terminal tipe-A

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	REALISASI
IKK 3	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	77,44	83,41
	- Jumlah terminal yang melaporkan data produksi di SIASATI (Bobot 74%)	lokasi	96,12	110,68
	- Jumlah pengadaan mesin check in ticket (Bobot 8,4%)	lokasi	24,27	7,77
	- Jumlah penerapan TOS (Bobot 17,6%)	lokasi	24,27	4,85

$$\begin{aligned}
 \%Penerapan\ Smart\ Terminal &= \left[\frac{\text{Jumlah TTA Yang Melaporkan Operasional Secara Online}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 74\% \right] + \\
 &\left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang mesin check in ticket dan passenger gate}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 8,4\% \right] \\
 &+ \\
 &\left[\frac{\text{Jumlah terminal dipasang vehicle gate, digital information, cctv}}{\text{Jumlah TTA kewenangan Ditjen Hubdat yang Beroperasi}} \times 17,6\% \right] \\
 &= \left[\frac{114}{103} \times 74\% \right] + \left[\frac{8}{103} \times 8,4\% \right] + \left[\frac{5}{103} \times 17,6\% \right] \\
 &= 83,41\%
 \end{aligned}$$

IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
			NOVEMBER
A	Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan	35%	
1	SAKIP	20%	
a	Rencana Strategis (Renstra)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤ 60 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 61-90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >90 hari setelah Renstra K/L ditetapkan		
b	Rencana Kerja Tahunan (RKT)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai >30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (maksimal 1 Desember)		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 1-30 hari sebelum Awal Tahun Anggaran (2-31		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai ≥1 hari setelah Awal Tahun Anggaran (≥1 Januari)		
c	Perjanjian Kinerja (PK)	3	3
	Nilai 3 (tiga) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan		
	Nilai 2 (dua) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (21		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20		
d	Rencana Aksi (Renaksi)	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selesai ≤ 20 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan		
	Nilai 1,5 (satu koma lima) apabila selesai 21-50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran		
	Nilai 1 (satu) apabila selesai >50 hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan (20		
e	Input Aplikasi e-Performance	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode tanggal 1-5 setiap bulannya		
f	Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I, II, III	2	2
	Nilai 2 (dua) apabila selalu tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-		
	Nilai 1 (satu) apabila tidak tepat waktu dalam periode 20 hari setelah triwulan berakhir (1-		
g	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	4	4
	Nilai 4 (empat) apabila selesai ≤25 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 2 (dua) selesai 25-55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
	Nilai 1 (satu) selesai >55 hari setelah Tahun Anggaran berakhir untuk UPT		
2	Input Aplikasi e-Planning	15%	
a	Input Aplikasi e-Planning Pagu Kebutuhan	5	4
b	Input Aplikasi e-Planning Pagu Indikatif	5	4
c	Input Aplikasi e-Planning Pagu Definitif	5	4
B	Indeks Profesionalisme ASN	35%	
1	Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)	8,5	8,5
2	Kompetensi	14	14
3	Kinerja	11	11
4	Disiplin	1,5	1,5
C	Tingkat Pengelolaan Keuangan	30%	
1	Daya Serap Anggaran Satuan Kerja	10	5
	Nilai 10 (sepuluh) apabila status excellent atau capaian daya serap ≥100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila status on-track atau capaian daya serap 80,1% sampai dengan 99,99%		
	Nilai 6 (enam) apabila status warning atau capaian daya serap 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 5 (lima) apabila status alert atau capaian daya serap di bawah 60%		
2	Tingkat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	10	2
	Nilai 10 (sepuluh) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 80,1% sampai dengan 100%		
	Nilai 8 (delapan) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 60,1% sampai dengan 80%		
	Nilai 6 (enam) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 40,1% sampai dengan 60%		
	Nilai 4 (empat) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) sebesar 20,1% sampai dengan 40%		
	Nilai 2 (dua) apabila Penetapan Status Penggunaan (PSP) di bawah 20%		
3	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut LHP dan LHA (Itjen dan BPK)	10	10

NO	URAIAN	BOBOT	NILAI
			NOVEMBER
	<i>Nilai 10 (sepuluh) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 80,1% sampai dengan 100%</i>		
	<i>Nilai 8 (delapan) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 60,1% sampai dengan 80%</i>		
	<i>Nilai 6 (enam) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 40,1% sampai dengan 60%</i>		
	<i>Nilai 4 (empat) apabila Persentase TL Tuntas sebesar 20,1% sampai dengan 40%</i>		
	<i>Nilai 2 (dua) apabila Persentase TL Tuntas di bawah 20%</i>		
			83

Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat
Eselon IV

		2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	-	70	71	72	73	74

1	2	4	8	8
4	2	4	32	32
8	2	4	64	96
				57

2,993

| 0,00 |

52

	Direktur Prasarana Transportasi Jalan	1	2	3	4
Kondisi Ruang Kerja	4	0	0	0	1
Kebersihan Ruang Kerja	3	0	0	1	0
NILAI					

Eselon	13
Staf	86
	73

44.748.264.849

19949970000

64.698.234.849

75400000

64.773.634.849

47.896.812.000

21092500000

68.989.312.000

68989312000

5
0 4
0 3
7

	KSD TAJ	KSD PKB	KSD Faspim	KSD KP	1	2	3	4	5	
Kondisi Ruang Kerja	3	4	3	4	0	0	2	2	0	14
Kebersihan Ruang Kerja	4	3	4	3	0	0	2	2	0	14
TOTAL NILAI										7

	KASI RB TAJ	KASI PENGLOLAAN TAJ
Kondisi Ruang Kerja	3	4
Kebersihan Ruang Kerja	4	3

KASI RB PKB	KASI PENGLOLA AN PKB	KASI FASKUNG	KASI IG	KASI PK	KASI PENGEVA LUASI	SUBBAG TU	1	2	3	4	5	
3	4	3	-	3	3	4	0	0	5	3	0	27
4	3	4	-	4	3	4	0	0	3	5	0	29
TOTAL NILAI												7

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kondisi Ruang Kerja	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3
Kebersihan Ruang Kerja	4	3	3	4	3	4	3	5	3	5	3	4

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	5	3	3	3	3	4	4	3	3	3	5	5	3	3	3	4	4	3	3	3	3
4	3	3	4	4	3	3	3	3	5	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	5	5	3	3	4	4	4	3	4	3	5	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3

55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	1	2	3	4	5	
5	3	3	3	3	5	4	3	3	4	3	3	3	5	3	3	3	4	4	0	0	50	17	6	248
5	3	5	3	4	4	3	5	3	4	3	3	5	3	5	3	3	4	4	0	0	40	22	11	263
																							7	

